



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL



DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025

DAFTAR ISI



	DAFTAR ISI	2
	RINGKASAN EKSEKUTIF	4
	KATA PENGANTAR KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL (BP2KOMDIGI)	8
BAB	1 PENDAHULUAN	11
	1.1 Latar Belakang	12
	1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
	1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis	18
	1.4 Sistematika Pelaporan	20
BAB	2 PERENCANAAN KINERJA	23
	2.1 Rencana Strategis BP2KOMDIGI Tahun 2025–2029	24
	2.2 Sasaran Strategis BP2KOMDIGI Tahun 2025–2029	25
	2.3 Strategi Pencapaian Kinerja	26
	2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
	2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 2025	27
BAB	3 AKUNTABILITAS KINERJA	31
	3.1 Capaian Kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025	32
	3.2 Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	35
	3.3 Sasaran Kegiatan 2 - Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerja Sama Sesuai Standar Internasional	69
	3.4 Kinerja Lainnya	81
	3.5 Realisasi Anggaran	103
BAB	4 PENUTUP	107

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas perangkat telekomunikasi di Indonesia. BP2KOMDIGI sebagai laboratorium uji yang telah diakui dan telah diresmikan oleh pemerintah, akan terus meningkatkan kinerja dalam menyediakan layanan pengujian yang akurat, cepat, dan efisien. BP2KOMDIGI telah melaksanakan berbagai langkah peningkatan kinerja, termasuk peningkatan fasilitas laboratorium, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional. Selain itu, BP2KOMDIGI juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memastikan bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan standar internasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kemajuan teknologi telekomunikasi, BP2KOMDIGI telah melakukan berbagai langkah signifikan untuk meningkatkan kapasitas pengujian. Di mana, pada tahun 2025, BP2KOMDIGI melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan pengujian, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem perangkat digital nasional. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur pengujian, peningkatan peran kelembagaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemenuhan kapasitas pengujian perangkat TIK melalui pengadaan perangkat *Specific Absorption Rate* (SAR). Pengadaan perangkat tersebut bertujuan untuk mendukung penerapan standar keselamatan penggunaan perangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, BP2KOMDIGI juga melaksanakan kegiatan fasilitasi pengujian dan pengembangan perangkat digital dalam negeri melalui penguatan peran kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan terhadap industri dalam negeri agar memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan serta mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

BP2KOMDIGI berkomitmen untuk mendukung inovasi, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kapasitasnya guna mendorong kemajuan teknologi telekomunikasi yang lebih baik, aman, dan berkualitas untuk menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK Bertaraf Internasional.

Ringkasan pencapaian kinerja BP2KOMDIGI diuraikan pada tabel di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	3,6	3,86
		2. Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	8,5	9,22
		3. Persentase (%) Capaian Target PNBPN Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur (Rp27.880.000.000,-)	Rp27.880.000.000,- (100%)	Rp72.288.000.000,- (259%)
		4. Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	96%	99,43%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Efisien dan Efektif	5. Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI	85	83,73
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	90	100

Pada Sasaran Program I “Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur” terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator, di antaranya:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 1 sesuai target tahun 2025 adalah tercapainya Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan target nilai 3,6 dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 3,86 melebihi target yang telah ditetapkan.

Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 2 sesuai target tahun 2025 adalah tercapainya Integritas Pelayanan Publik Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan nilai 8,5 dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 9,22 melebihi target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) Capaian Target PNBP Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 3 sesuai target tahun 2025 adalah pendapatan PNBP Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan nilai Rp27.880.000.000,- dan realisasi capaian kinerja yang didapatkan adalah Rp72.288.000.000,- atau 259% melebihi target yang telah ditentukan.

Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 4 sesuai target tahun 2025 adalah 96% dan realisasi capaian kinerja 99,43% melebihi target yang telah ditentukan.

Pada Sasaran Program II “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Efisien dan Efektif” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator, di antaranya:

Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI

Indikator kinerja sasaran strategis 5 sesuai target tahun 2025 adalah 85, di mana nilai kinerja anggaran adalah nilai kinerja perencanaan yang ditambahkan dengan nilai pelaksanaan anggaran realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 83,73; kurang dari target karena variabel nilai perencanaan adalah efektivitas perencanaan anggaran berbobot 75 dan efisiensi berbobot 25 (SBK 10 dan Efektivitas 25). Namun BP2KOMDIGI belum menggunakan SBK di tahun 2025, sehingga untuk capaian maksimal nilai kinerja perencanaan memiliki bobot 75 (Capaian RO).

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator kinerja sasaran strategis 6 sesuai target tahun 2025 adalah mendapatkan nilai kualitas atas pelaporan keuangan dengan target nilai 90 dan realisasi capaian kinerja adalah 100, melebihi target yang telah ditentukan.



KATA PENGANTAR KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL (BP2KOMDIGI)

*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan baik.

Tahun 2025 merupakan tahapan awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029. BP2KOMDIGI memegang peran penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan, meningkatkan kapasitas layanan, serta mendukung ekosistem perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional yang semakin berkembang.

Sepanjang tahun 2025, BP2KOMDIGI terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fasilitas pengujian sebagai bagian



dari komitmen dalam memberikan layanan yang andal, akurat, dan berstandar internasional. Berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan, di antaranya pemenuhan kapasitas pengujian perangkat TIK melalui pengadaan perangkat *Specific Absorption Rate* (SAR) guna mendukung pengujian aspek keselamatan radiasi perangkat. Selain itu, BP2KOMDIGI juga mendorong fasilitasi pengujian dan pengembangan perangkat digital dalam negeri melalui penguatan peran kelembagaan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing industri nasional.

Upaya peningkatan kinerja tersebut turut didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia. BP2KOMDIGI secara aktif melibatkan *distinguished expert*, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menyelenggarakan berbagai program *knowledge sharing* sebagai sarana peningkatan kompetensi, transfer pengetahuan, dan adopsi praktik terbaik di bidang pengujian perangkat telekomunikasi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP2KOMDIGI selama tahun 2025, sekaligus sebagai media evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa capaian yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja BP2KOMDIGI.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja BP2KOMDIGI serta menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan strategi ke depan, sejalan dengan arah pembangunan sektor komunikasi dan digital nasional.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan dibuatnya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan BP2KOMDIGI dan kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depok, Februari 2026

Kepala Balai Besar

Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital,

Rahman



Bab

1

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital. BP2KOMDIGI memiliki tiga peran utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, BP2KOMDIGI berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan negara dari peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis maupun standar emisi yang telah ditetapkan (*protect*). Melalui kegiatan pengujian dan evaluasi teknis, BP2KOMDIGI memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang digunakan masyarakat tidak menimbulkan interferensi yang dapat mengganggu layanan telekomunikasi lainnya serta tetap memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan pengguna.

Kedua, BP2KOMDIGI dituntut untuk menjalankan peran yang lebih signifikan sebagai gerbang arus masuk dan keluar produk-produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik yang berasal dari kegiatan impor maupun ekspor (*gate*). Dalam hal ini, BP2KOMDIGI berperan dalam proses

pengujian dan verifikasi kesesuaian perangkat terhadap standar nasional maupun internasional sebagai bagian dari mekanisme sertifikasi perangkat telekomunikasi. Peran tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya ekosistem industri TIK yang sehat, kompetitif, serta mampu melindungi pasar dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar.

Ketiga, BP2KOMDIGI juga memiliki peran dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio nasional (*spectrum management*). Peran ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi yang berkualitas serta mendukung tata kelola spektrum frekuensi yang optimal di tingkat nasional.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi di berbagai sektor, BP2KOMDIGI terus melakukan pengembangan kapasitas, fasilitasi, serta inovasi secara berkelanjutan di berbagai bidang.

Pada tahun 2025, BP2KOMDIGI melaksanakan sejumlah kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi. Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah pemenuhan kapasitas pengujian perangkat TIK melalui pengadaan perangkat *Specific Absorption Rate* (SAR). Pengadaan perangkat SAR tersebut merupakan implementasi dari kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pengujian SAR Sesuai dengan Acuan Standar Internasional sebagai Salah Satu Persyaratan dalam Proses Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi.

Pengujian SAR menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang digunakan masyarakat memenuhi batas aman paparan gelombang elektromagnetik terhadap tubuh manusia. Dengan dilaksanakannya pengujian tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat dari potensi dampak kesehatan dan keselamatan yang mungkin timbul akibat penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar.

Selain itu, BP2KOMDIGI juga melaksanakan kegiatan fasilitasi pengujian dan pengembangan perangkat digital dalam negeri melalui penguatan peran kelembagaan. Upaya tersebut juga didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yakni melalui pelibatan *distinguished expert* dari dalam dan luar negeri serta penyelenggaraan program *knowledge sharing*. Melalui berbagai kegiatan tersebut, BP2KOMDIGI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong lahirnya produk

perangkat digital dalam negeri yang inovatif, berkualitas, dan memiliki daya saing di tingkat global. Peran tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem inovasi nasional dengan menyediakan layanan pengujian dan kalibrasi, memperkuat kerja sama riset nasional maupun internasional, serta mengembangkan fasilitas *makerspace* sebagai ruang kolaborasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan secara terarah, antara lain melalui pendampingan dan perluasan kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, penyelenggaraan lomba inovasi, *workshop*, seminar, dan pameran teknologi, pengembangan dan pendampingan *makerspace* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri, serta institusi pendidikan. Selain itu, penguatan *branding* dan strategi pemasaran BP2KOMDIGI juga terus dilakukan guna memperkuat posisinya sebagai laboratorium pengujian perangkat digital yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan BP2KOMDIGI dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pengujian perangkat telekomunikasi, mendukung pengembangan industri perangkat digital nasional, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor infrastruktur dan perangkat digital.

Penyusunan laporan kinerja ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menggambarkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital selama periode tertentu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat pencapaian kinerja, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan **Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)**. Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, terjadi perubahan nomenklatur pada tahun 2025 di mana Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Selain itu, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi juga mengalami perubahan nomenklatur yang ditetapkan melalui regulasi terbaru. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 20 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital yang disahkan pada bulan Desember 2025.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, dibina secara administratif oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, serta dibina secara teknis operasional oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP2KOMDIGI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



01 Penyusunan rencana, program, dan anggaran;



02 Pelaksanaan manajemen layanan dan mutu untuk pengujian dan kalibrasi alat ukur pengujian, serta penyelenggaraan uji profisiensi untuk pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital;



03 Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan pemeliharaan laboratorium pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital;

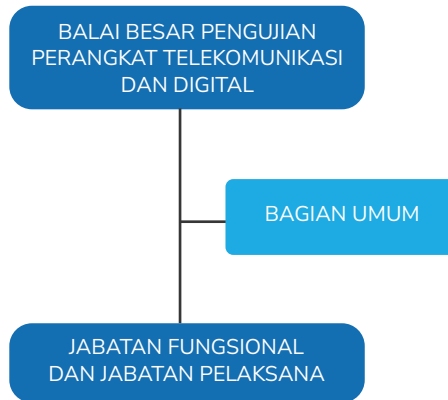


04 Pelaksanaan laboratorium rujukan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital; dan



05 Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BP2KOMDIGI

Struktur organisasi BP2KOMDIGI berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 20 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, yang terdiri atas:

Bagian Umum	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksanaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.	Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, sedangkan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) memiliki potensi sangat besar dalam mewujudkan cita-citanya selama ini untuk menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Rujukan Berstandar Internasional. Potensi ini dapat terwujud dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) di BP2KOMDIGI yang sangat kompeten dan berjumlah banyak, terutama dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan, BP2KOMDIGI dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berperan penting dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi, baik dalam negeri maupun internasional.

BP2KOMDIGI telah terakreditasi ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium pengujian dan ISO/IEC 17043 untuk penyelenggara uji profisiensi, yang menunjukkan bahwa laboratorium BP2KOMDIGI telah memenuhi standar internasional dalam hal kompetensi pengujian dan kalibrasi. BP2KOMDIGI juga telah tersertifikasi ISO/IEC 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang menunjukkan komitmennya dalam sistem manajemen anti-penyuapan sebagai bentuk kredibilitas dan integritas BP2KOMDIGI.

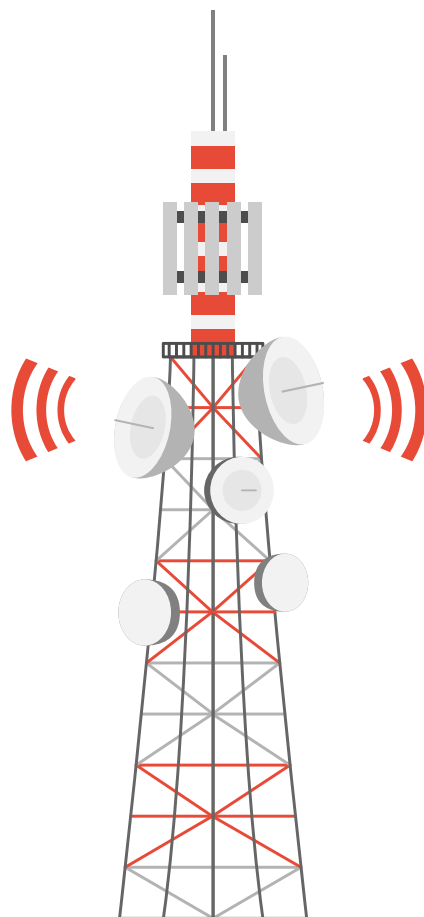
BP2KOMDIGI memiliki 12 laboratorium yang dilengkapi fasilitas laboratorium canggih, berstandar internasional, dan mampu mendukung pengujian perangkat telekomunikasi yang akurat, efisien, dan hasil pengujiannya dapat diterima secara internasional. Selain itu, BP2KOMDIGI merupakan satu-satunya laboratorium yang memiliki perangkat pengujian *Specific Absorption Rate* (SAR) yang berfungsi untuk memastikan keamanan dan kualitas perangkat telekomunikasi yang beredar. Diharapkan dengan ini mampu membuat BP2KOMDIGI menjadi pusat rujukan utama bagi industri telekomunikasi.

BP2KOMDIGI merupakan satu-satunya penyelenggara uji profisiensi di bidang telekomunikasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui kegiatan ini, BP2KOMDIGI membantu memastikan bahwa laboratorium pengujian di Indonesia dapat menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten. Dengan menjadi satu-satunya penyelenggara uji profisiensi di bidang telekomunikasi dapat mendukung pengembangan industri telekomunikasi yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia.

Diharapkan dengan semua potensi ini dapat menjadikan BP2KOMDIGI sebagai lembaga yang sangat berperan dalam memastikan industri telekomunikasi di Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan berkualitas tinggi, sehingga mampu mewujudkan cita-cita BP2KOMDIGI selama ini untuk menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Rujukan Berstandar Internasional.

Adapun isu/permasalahan strategis di BP2KOMDIGI yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja unggulnya serta mendukung pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Berikut merupakan Isu/Permasalahan Strategis di BP2KOMDIGI:

1. BP2KOMDIGI menjadi *Center of Excellence* yang berperan serta dalam mendukung pengembangan ekosistem digital nasional yang berdaya saing dan *inclusive* serta mempercepat adopsi *emerging technologies* menuju kemandirian Indonesia dalam hal perangkat TIK;
2. Peningkatan peran kolaborasi dan kerja sama dalam rangka pengakuan Indonesia pada tata kelola perangkat digital di forum internasional dalam mendukung perumusan kebijakan yang efektif dalam melaksanakan transformasi digital khususnya di bidang konektivitas wilayah Indonesia kedaulatan bangsa (*sovereignty*);
3. Mendukung transformasi digital dalam pengembangan industri, inovasi, rekayasa teknologi informasi dan komunikasi nasional;
4. Pengembangan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui sertifikasi dalam dan luar negeri;
5. Optimalisasi pelayanan dan kapasitas laboratorium pengujian.



1.4 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian BP2KOMDIGI. Sistematika laporan ini disusun dengan mempertimbangkan pentingnya informasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja, tantangan, dan upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Penyusunan Laporan Kinerja BP2KOMDIGI berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun format laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





Bab

2

PERENCANAAN **KINERJA**



2.1 Rencana Strategis BP2KOMDIGI Tahun 2025–2029

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengujian perangkat telekomunikasi nasional. Dalam rangka memastikan arah pembangunan organisasi yang terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, BP2KOMDIGI menyusun **Rencana Strategis (Renstra) BP2KOMDIGI Tahun 2025–2029** sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra BP2KOMDIGI 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinamika perkembangan teknologi telekomunikasi global. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program BP2KOMDIGI dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia.

BP2KOMDIGI memiliki tugas melaksanakan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang meliputi pengujian teknis, evaluasi kesesuaian standar, serta kegiatan kalibrasi dan pengembangan sistem mutu pengujian. Dalam menjalankan tugas tersebut, BP2KOMDIGI berperan sebagai laboratorium pengujian nasional yang memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar teknis, keselamatan, dan interoperabilitas yang berlaku.

Sejalan dengan arah transformasi digital nasional serta penetapan BP2KOMDIGI sebagai **Indonesia Digital Test House (IDTH)**, peran BP2KOMDIGI semakin strategis dalam mendukung pengembangan ekosistem teknologi digital nasional. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan metode dan standar pengujian yang mengikuti perkembangan teknologi seperti 5G, *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, serta perangkat telekomunikasi berbasis teknologi baru lainnya.

Renstra BP2KOMDIGI 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan analisis lingkungan strategis yang mencakup aspek politik dan regulasi, ekonomi digital, perkembangan teknologi, serta faktor lingkungan hidup

yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia. Analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi organisasi agar mampu menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada dalam mendukung transformasi digital nasional.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan BP2KOMDIGI memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mampu mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2 Sasaran Strategis BP2KOMDIGI Tahun 2025–2029

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BP2KOMDIGI dalam kurun waktu lima tahun yang menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Perumusan sasaran strategis BP2KOMDIGI 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital serta sasaran pembangunan sektor komunikasi dan informatika secara nasional.

Sasaran strategis BP2KOMDIGI diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi serta memperkuat peran BP2KOMDIGI sebagai pusat pengujian perangkat telekomunikasi nasional yang berstandar internasional. Melalui sasaran strategis tersebut, BP2KOMDIGI diharapkan mampu meningkatkan keandalan perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat serta turut mendukung pengembangan ekosistem digital nasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran strategis BP2KOMDIGI diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam memberikan layanan pengujian, meningkatkan kepuasan pengguna layanan, memperkuat kerja sama dengan lembaga pengujian internasional, serta meningkatkan tata kelola organisasi yang baik.

Dengan sasaran strategis yang terukur, BP2KOMDIGI dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan organisasi serta mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.3 Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, BP2KOMDIGI menetapkan berbagai strategi yang meliputi:

1.

Peningkatan kapasitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi, melalui penguatan fasilitas laboratorium serta modernisasi peralatan pengujian.

2.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi telekomunikasi terbaru seperti 5G, IoT, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

3.

Penguatan sistem mutu laboratorium pengujian, melalui penerapan standar internasional serta peningkatan kualitas proses pengujian.

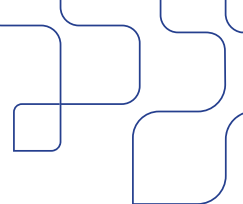
4.

Pengembangan kerja sama nasional dan internasional, dalam rangka meningkatkan pengakuan terhadap hasil pengujian BP2KOMDIGI di tingkat global.

5.

Peningkatan kualitas layanan publik, melalui digitalisasi proses layanan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Strategi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta perjanjian kinerja BP2KOMDIGI.



2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja BP2KOMDIGI Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan BP2KOMDIGI dengan pimpinan unit kerja di atasnya dalam rangka mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra BP2KOMDIGI 2025–2029.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BP2KOMDIGI selama tahun 2025. Indikator tersebut antara lain mencerminkan kinerja layanan pengujian perangkat telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan BP2KOMDIGI, serta penguatan tata kelola organisasi.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, setiap unit kerja di lingkungan BP2KOMDIGI memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Dengan adanya keselarasan antara Rencana Strategis, Sasaran Strategis, dan Perjanjian Kinerja, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BP2KOMDIGI tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi serta mendukung transformasi digital nasional.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 2025

Rencana Kerja Anggaran (RKA) BP2KOMDIGI untuk tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang merinci kegiatan dan alokasi anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BP2KOMDIGI selama tahun 2025. BP2KOMDIGI merencanakan berbagai kegiatan strategis yang sesuai dengan prioritas dan tujuan organisasi, RKA untuk tahun 2025 juga mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan PN dan Non-PN, dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja BP2KOMDIGI. Dokumen ini akan menjadi panduan operasional bagi BP2KOMDIGI selama tahun 2025, serta

menjadi dasar untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja kepada pihak yang berwenang. Dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja 2025, BP2KOMDIGI memiliki total anggaran sebesar Rp95.852.015.000,- yang dibagi menjadi 2 program utama antara lain:

No	Program	Alokasi Anggaran
1.	Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	Rp48.823.290.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp47.028.725.000,-
Total		Rp95.852.015.000,-

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
SP. 7	Sasaran SK.1:	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	
IKP 7.1	IKSK 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	3,6
IKP 7.3	IKSK 1.2	Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	8,5
IKP. 7.2	IKSK 1.3	Persentase (%) Capaian Target PNBPN Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	100%
IKP 7.1	IKSK 1.4	Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	96%
S.P	Sasaran SK. 2:	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BP2KOMDIGI yang Efisien dan Efektif	
	IKSK. 2.1	Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI	85
	IKSK. 2.2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) merupakan perjanjian kinerja

yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktur Infrastruktur Digital. PK ini merupakan instrumen manajemen kinerja yang penting dalam mengukur pencapaian tujuan dalam peningkatan kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja BP2KOMDIGI pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis di antaranya 4 (empat) indikator dengan berfokus pada pengembangan BP2KOMDIGI dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi dan 2 (dua) indikator terkait dukungan teknis pada Nilai Kinerja Anggaran, berikut merupakan Sasaran Strategis BP2KOMDIGI:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur; dan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Efisien dan Efektif

Indikator tercapainya Sasaran Strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan target 2025 adalah 3,6 yang dinilai melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur tahun 2025 yang terdiri dari berbagai aspek penilaian antara lain waktu penyelesaian layanan, aspek penanganan pengaduan dan sebagainya;
2. Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan target 2025 adalah 8,5 yang dinilai melalui penilaian masyarakat terhadap integritas pelayanan publik terkait pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur tahun 2025 yang terdiri dari kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan etika;
3. Persentase (%) Capaian PNBPN Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur target pendapatan pada tahun 2025 adalah Rp27.880.000.000,- (100%) dengan menghitung capaian PNBPN pengujian dan kalibrasi pada akhir tahun 2025;
4. Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur dengan target tahun 2025 adalah 96% di mana persentase penyelesaian permohonan pengujian perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur sesuai dengan standar waktu layanan dibandingkan jumlah permohonan pengujian dan kalibrasi yang masuk tahun 2025;

5. Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI dengan target tahun 2025 adalah 85 di mana nilai capaian didapatkan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%);
6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target tahun 2025 adalah 97 di mana Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan BP2KOMDIGI dilihat dari hasil penilaian Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang terdiri dari beberapa faktor yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK, saldo kas, ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, Hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan.



Bab

3

AKUNTABILITAS
KINERJA

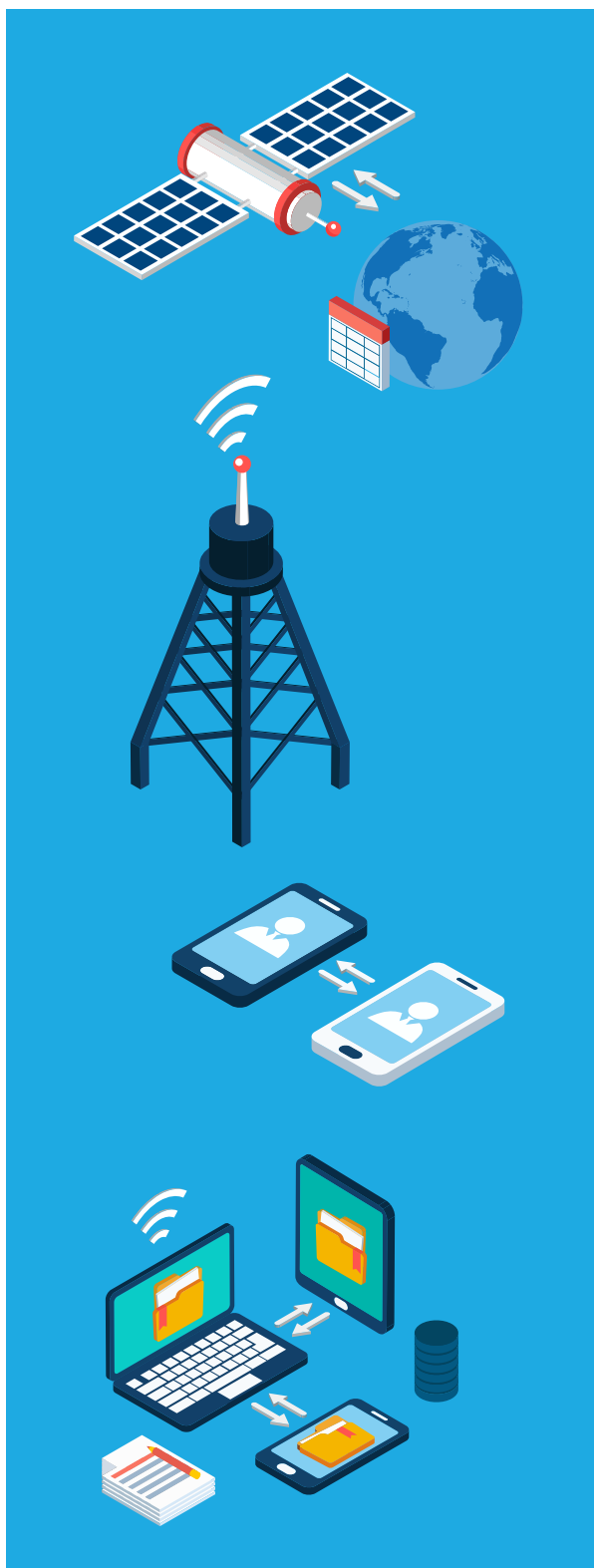


3.1 Capaian Kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025

Pada tahun 2025, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) berhasil mencatat berbagai capaian signifikan yang memperlihatkan komitmen dan dedikasinya dalam mendukung pengembangan sektor telekomunikasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengujian dan kalibrasi, BP2KOMDIGI terus memperkuat kapasitasnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk memenuhi standar regulasi dan kebutuhan industri.

Capaian kinerja BP2KOMDIGI tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kapasitas pengujian, kualitas pelayanan, serta kontribusi dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi nasional. BP2KOMDIGI akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan dan siap menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang dalam mendukung perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin berkembang.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas yang tinggi, BP2KOMDIGI terus berupaya memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh



seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan “Program dan Kegiatan” yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi BP2KOMDIGI. Misi tersebut diupayakan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui sebuah laporan kinerja selama tahun 2025. Berikut merupakan target dan capaian kinerja BP2KOMDIGI yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja BP2KOMDIGI Tahun 2025:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	3,6	3,86
		2. Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	8,5	9,22
		3. Persentase (%) Capaian Target PNBPN Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur (Rp27.880.000.000,-)	Rp27.880.000.000,- (100%)	Rp72.288.000.000,- (259%)
		4. Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	96%	99,43%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Efisien dan Efektif	5. Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI	85	83,73
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	90	100

Analisis untuk setiap Sasaran Kegiatan dan IKK dapat dijelaskan sebagai berikut:

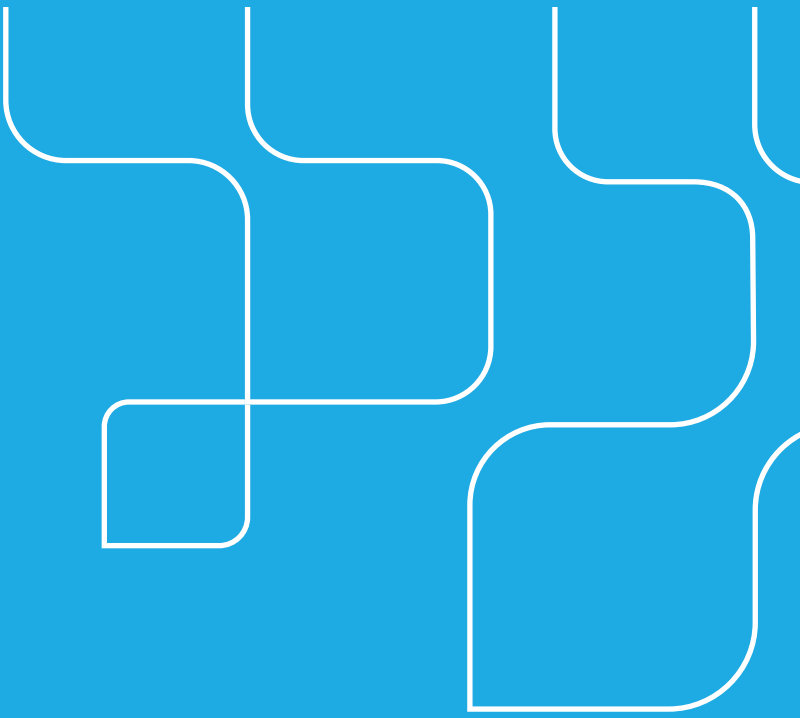
3.2 Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Sasaran kegiatan ini memiliki 4 (empat) indikator, yang terdiri dari (1) “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur”, (2) “Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur”, (3) “Persentase (%) Capaian Target PNPB Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur (Rp27.880.000.000,-)”, dan (4) “Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur”.

3.3 Sasaran Kegiatan 2 - Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerja Sama Sesuai Standar Internasional

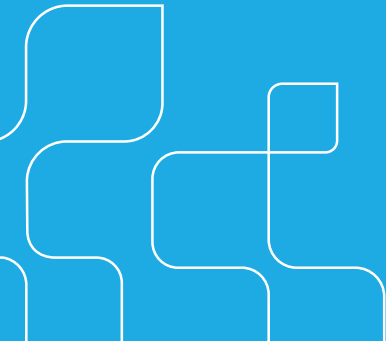
Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator, yang terdiri dari (1) “Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI”, dan (2) “Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)”.





Sasaran **Kegiatan 1 -**

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian
Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur



IKSK 1.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur Digital Tahun 2025 (skala 0–4)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	3,60	3,86

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan/Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik Kemkomdigi, layanan publik di Ditjen Infrastruktur Digital di antaranya adalah layanan pengujian dan kalibrasi alat ukur. Pemenuhan kualitas dan kinerja layanan publik dapat diukur dari tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, akuntabilitas, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sehingga penyelenggara wajib berupaya meningkatkan pelayanan publik guna membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik seiring harapan seluruh warga negara.

Setiap instansi saat ini terus-menerus mengoptimalkan pelayanan publiknya agar memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari sistem pelayanannya, prosedur maupun jangka waktu penyelesaian layanan. Hal ini juga turut mendorong Satker penyedia layanan senantiasa memenuhi kebutuhan dan mengurangi permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital merupakan salah satu lembaga pengujian alat/perangkat telekomunikasi yang telah terakreditasi ISO 17025 oleh KAN di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital. Pada konteks tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital sebagai penyelenggara layanan pengujian yang berdampak luas, tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna

terhadap pelayanan pengujian dan kalibrasi alat ukur, tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, ruang lingkup IKM meliputi:

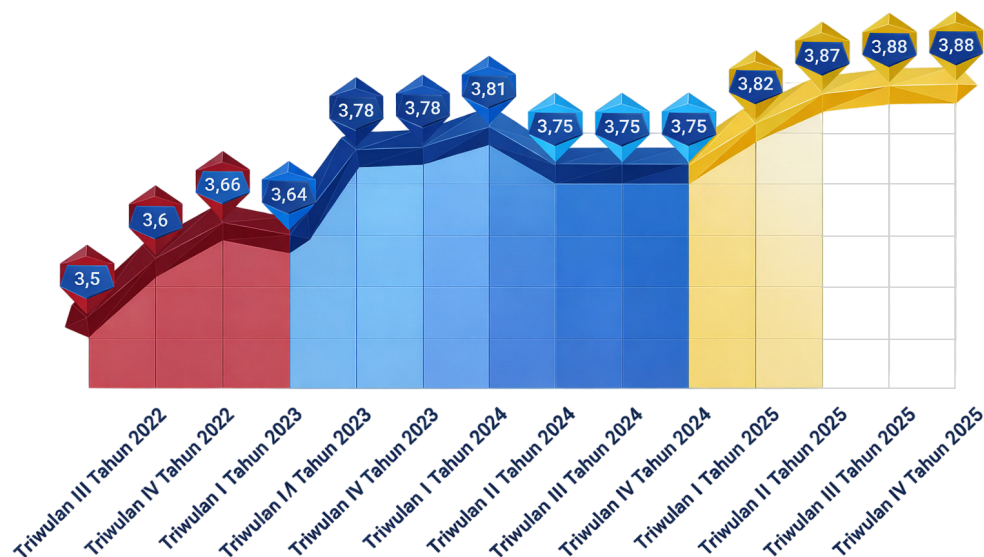
Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Waktu Penyelesaian
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biaya/Tarif	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Sarana dan Prasarana
Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.	Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dan merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Capaian Target

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dari triwulan III tahun 2022 hingga triwulan IV tahun 2025. Pelaksanaan survei melalui sistem informasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital memiliki keunggulan pengumpulan data secara digital dan aksesibilitas yang lebih luas sehingga responden dapat mengisi survei kapan saja dan di mana saja. Selain itu, data yang terkumpul langsung tercatat secara *real-time*, memudahkan pemantauan capaian IKM dan mengurangi risiko kesalahan input, sementara pengolahan dan analisis data menjadi lebih cepat karena dapat langsung diproses dalam format digital. Survei melalui aplikasi juga meningkatkan kenyamanan dan anonimitas responden, mendorong jawaban sebenarnya, serta memungkinkan desain pertanyaan yang interaktif dan

fleksibel, sehingga hasil pengukuran kepuasan masyarakat menjadi lebih akurat, representatif, dan dapat dijadikan dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan publik.

Capaian IKM Triwulan Periode 2022–2025

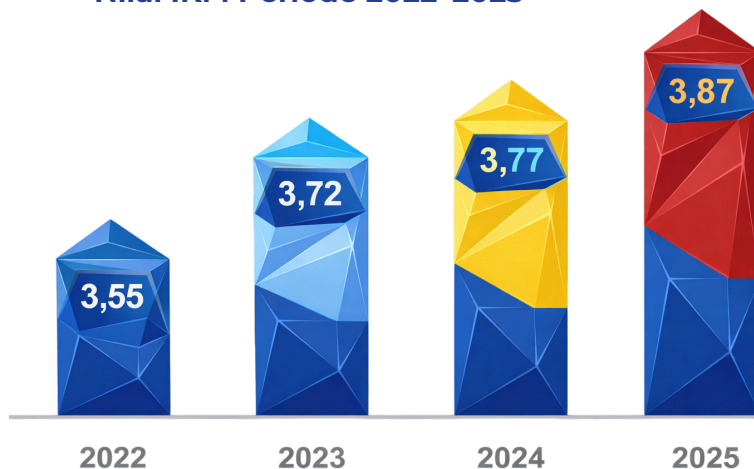


Gambar 2. Grafik Capaian IKM Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Per Triwulan Periode 2022–2025

Upaya peningkatan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dari sisi internal dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan kegiatan pembaruan pengetahuan, keterampilan, etika, dan motivasi personel pelayanan, serta peningkatan sinergisitas antarpersonel agar tercipta kolaborasi kerja yang baik. Kinerja personel dievaluasi dan diberikan apresiasi sebagai upaya peningkatan motivasi dan budaya kerja positif.

Komitmen Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam meningkatkan mutu layanan diwujudkan melalui mekanisme penjangkaran aspirasi pengguna layanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui banyak kanal. Layanan konsultasi dan pengaduan tidak hanya berperan sebagai sarana diskusi teknis terkait permohonan layanan pengujian dan kalibrasi, tetapi juga menjadi saluran tambahan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari pengguna layanan, di mana data pengaduan dan konsultasi dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut secara sistematis setiap bulannya.

Nilai IKM Periode 2022–2025



Gambar 3. Grafik Nilai IKM Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Periode 2022–2025

Selain itu, forum konsultasi publik untuk masing-masing layanan dilaksanakan dalam rangka melakukan reviu serta menghimpun masukan dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan terhadap petunjuk pelaksanaan layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan kebutuhan pengguna layanan dan kondisi aktual di lapangan. Hasil forum menjadi dasar penyempurnaan petunjuk pelaksanaan layanan sehingga penyelenggaraan layanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Konsultasi publik juga dilakukan dalam rangka penyusunan draf tarif volatil di mana tarif volatil memungkinkan penyesuaian biaya layanan secara lebih adaptif terhadap kondisi pasar, pengelolaan sumber daya, kompleksitas layanan, frekuensi permohonan, kebutuhan pengguna layanan, dan perubahan regulasi. Dalam forum juga dilakukan pemetaan kebutuhan kalibrasi bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengidentifikasi urgensi pelaksanaan kalibrasi alat ukur yang paling dibutuhkan oleh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan, pengendalian, dan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi. Pemetaan ini membantu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam merencanakan kapasitas layanan, memperbaiki prosedur, dan menyesuaikan sumber daya sehingga penyelenggaraan layanan lebih efisien. Hasil pemetaan disampaikan dan dibahas secara terbuka dalam forum untuk memperoleh masukan tambahan dari peserta forum.

Validitas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat ditentukan oleh kecukupan jumlah responden yang merepresentasikan populasi pengguna layanan. Penetapan jumlah responden dalam survei IKM dilaksanakan secara proporsional terhadap jumlah pengguna layanan dan mengacu pada kaidah statistik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Memon et al. (2020)¹ menyatakan bahwa ukuran sampel yang memadai secara statistik sudah cukup untuk menggambarkan karakteristik populasi target tanpa harus melibatkan seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, apabila jumlah responden survei IKM telah memenuhi ketentuan tersebut, maka hasil pengukuran dapat dinilai cukup valid untuk merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Setiap permohonan yang diterima dianggap sebagai satu unit populasi karena kepuasan dan pengalaman pelayanan akan diukur berdasarkan permohonan tersebut. Untuk populasi 2.153 permohonan pada tahun 2025, jumlah responden representatif dihitung menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* 5%, sehingga diperlukan sekitar 337 responden. *Margin of error* $\pm 5\%$ pada *confidence level* 95% merupakan praktik standar dalam survei kuantitatif untuk mengukur ketidakpastian estimasi sampel terhadap populasi, sehingga ukuran sampel yang memenuhi *margin error* tersebut membantu memastikan hasil survei cukup representatif dan mendekati nilai populasi sebenarnya (ScienceDirect, n.d.²). Berdasarkan data total jumlah responden survei selama tahun 2025 sebesar 796 jumlah permohonan, maka jumlah ini sudah representatif terhadap populasi dengan *margin of error* 5%.

Total Jumlah Responden Per Triwulan Tahun 2025



Gambar 4. Total Jumlah Responden Per Triwulan Tahun 2025

Lebih lanjut, keterwakilan responden dalam survei IKM juga ditunjukkan oleh kesesuaian distribusi karakteristik responden dengan struktur populasi pengguna layanan. Yeager et al. (2021)³ menjelaskan bahwa representativitas dapat dicapai apabila jumlah responden mencerminkan proporsi kelompok dalam populasi, sehingga hasil pengukuran mendekati kondisi sebenarnya. Hal ini sejalan dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang menekankan bahwa responden survei merupakan pengguna layanan yang menerima pelayanan secara langsung dan dipilih secara proporsional. Dalam rangka memastikan proporsionalitas tersebut, mekanisme survei dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi (SIMPEL) oleh pengguna layanan pada saat selesai menerima layanan. Pengguna layanan diwajibkan untuk mengisi survei terlebih dahulu sebelum dapat mengunduh produk layanan yaitu Laporan Hasil Uji.

Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025

No	Indikator Survei	Skala 1–4	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
1.	Persyaratan	3,81	A	Sangat Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3,83	A	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian Layanan	3,82	A	Sangat Baik
4.	Kemudahan Pembayaran	3,87	A	Sangat Baik
5.	Produk Hasil Layanan	3,88	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi Petugas	3,88	A	Sangat Baik
7.	Perilaku Petugas	3,90	A	Sangat Baik
8.	Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,92	A	Sangat Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3,85	A	Sangat Baik
IKM Layanan Pengujian Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital serta Kalibrasi Alat Ukur		3,86	A	Sangat Baik

Secara keseluruhan, responden yang disurvei pada tahun 2025 menghasilkan IKM Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital atas penyelenggaraan layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital serta kalibrasi alat ukur sebesar 3,86 (dalam skala 1–4) atau 96,50 (dalam skala 1–100). Indeks ini sudah masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan mutu pelayanan A (nilai berada

antara 88,31–100,00), artinya layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital serta kalibrasi alat ukur di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital sudah sangat baik, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital.

Indikator dengan nilai tertinggi yaitu Pengaduan, Saran, dan Masukan, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Kemudahan akses melalui beragam kanal komunikasi meningkatkan partisipasi pengguna layanan karena setiap pengguna dapat memilih saluran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya, respons pengaduan dikelola pada hari yang sama sesuai SOP yang berlaku, keterbukaan informasi penanganan pengaduan yang dapat diakses pada *website*, pemantauan dan evaluasi rutin memastikan setiap masukan ditindaklanjuti secara tepat sasaran. Hal ini juga didukung oleh partisipasi aktif pengguna layanan dalam memperkaya kualitas masukan, sehingga membantu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, sehingga secara keseluruhan mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan layanan publik.

Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan pencapaian target IKM layanan pengujian dan kalibrasi, didukung oleh pelaksanaan program kerja forum konsultasi publik yang interaktif dengan pengguna layanan, tindak lanjut hasil survei yang dilakukan per triwulan, pengukuran kinerja dan peningkatan kompetensi personel pelayanan, pengelolaan data konsultasi dan pengaduan yang sistematis, serta publikasi informasi terkait prosedur dan layanan pengujian di *website* dan media sosial lainnya.

Diantara 9 (sembilan) indikator dalam Survei Kepuasan Masyarakat, terdapat beberapa kategori dengan nilai relatif rendah yaitu indikator Waktu Penyelesaian Layanan, Persyaratan, dan Prosedur Pelayanan. Dalam rangka mendongkrak nilai pada indikator tersebut, dilakukan beberapa upaya/inovasi di antaranya:

1. Pengembangan SIMPEL Next Gen (dokumentasi dokumen teknis, kemudahan prosedur verifikasi, dan amandemen pelaporan hasil uji, pengurangan tarif 50% jika terdapat TKDN lebih besar sama dengan 50%).
2. Proses uji coba pengembangan Aplikasi SIMPEL pada *playstore* (saat ini tersedia format).
3. Penyesuaian dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital serta kalibrasi alat ukur yang bertujuan untuk meningkatkan kejelasan prosedur, keseragaman pelaksanaan layanan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan terhadap pengelolaan sumber daya dan jumlah permohonan.
4. Aplikasi SOP digital dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. Penerapan aplikasi ini mempermudah pegawai dalam mengakses dan menerapkan standar operasional prosedur secara konsisten, mempercepat alur pelayanan, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan layanan. Apabila dilakukan evaluasi SOP dalam rangka memastikan prosedur tetap efektif, relevan, dan mendukung peningkatan kualitas layanan, dapat ditindaklanjuti dengan cepat dengan riwayat perubahan yang terdokumentasi.

Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang telah Digunakan untuk Perbaikan pada Indikator Tersebut

Laporan Kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Infrastruktur Digital telah dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan, sekaligus mengidentifikasi aspek layanan yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.

Berdasarkan hasil analisis Laporan Kinerja tersebut, tindak lanjut yang dilakukan yakni penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital, khususnya pada unsur-unsur layanan

yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di bidang infrastruktur digital selaras dengan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

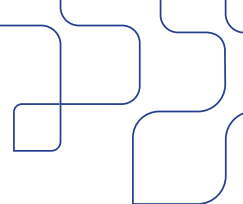
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap triwulan, dilakukan tindak lanjut secara sistematis terhadap aspek pelayanan yang memerlukan perbaikan. Tindak lanjut meliputi analisis hasil survei, identifikasi unsur pelayanan dengan nilai terendah, indikator terbanyak yang disampaikan dalam saran terbuka, serta penyusunan rencana perbaikan yang dilaksanakan. Hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut menjadi dasar pengukuran efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Mekanisme ini memastikan bahwa hasil survei tidak hanya menjadi data pengukuran, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Beberapa aspek yang ditindaklanjuti selama tahun 2025 di antaranya terkait pengembangan fitur deklarasi teknis melalui *web form* pada Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi (SIMPEL-K) sehingga memudahkan pengguna layanan dalam melakukan pengisian persyaratan dan memudahkan proses verifikasi aplikasi, pendataan usulan tarif volatil berdasarkan harga pasar dan perkembangan teknologi untuk menciptakan daya saing, evaluasi data waktu penyelesaian layanan dalam rangka pemutakhiran petunjuk pelaksanaan layanan, dan tindak lanjut atas konsultasi yang disampaikan oleh pengguna layanan.

Implementasi Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan indikator kepuasan masyarakat dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai *core values* ASN, penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan Bidang Infrastruktur Digital memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pencapaian target indikator kinerja, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui persediaan infrastruktur digital yang andal, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap layanan dirancang untuk memberikan kemudahan akses, kecepatan, dan keberlanjutan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Upaya perbaikan layanan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil survei IKM dan masukan dari masyarakat.



Nilai Akuntabel tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan infrastruktur digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan anggaran, pelaporan kinerja, serta pencapaian indikator dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga hasil pelaksanaan dapat dipantau dan dinilai secara objektif melalui capaian IKM.

Dalam mendukung nilai Kompeten, Bidang Infrastruktur Digital terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan serta efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai target kinerja.

Nilai Harmonis diwujudkan melalui kerja sama yang baik antarpegawai dan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Lingkungan kerja yang kondusif mendorong pelayanan yang ramah, inklusif, dan berkeadilan, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik dan puas terhadap layanan yang diberikan.

Penerapan nilai Loyal tercermin dari komitmen seluruh jajaran dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah serta menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital. Loyalitas ini diwujudkan melalui konsistensi dalam menjalankan tugas, menjaga integritas, dan memastikan setiap program selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan masyarakat.

Nilai Adaptif diimplementasikan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan layanan digital. Bidang Infrastruktur Digital secara proaktif melakukan inovasi dan peningkatan sistem guna memastikan layanan tetap relevan, efisien, dan berkualitas, yang berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan perangkat daerah lain, penyedia layanan, dan masyarakat dalam pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur digital. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas program, mempercepat pencapaian target indikator kinerja, serta meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

IKSK 1.2

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Infrastruktur Digital Tahun 2025 (skala 0–10)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	8,50	9,22

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan/Sasaran Kegiatan

Pelayanan publik di bidang infrastruktur digital memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penguatan integritas dalam setiap proses pelayanan menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada bidang infrastruktur digital. Pelaksanaan kegiatan IIPP Bidang Infrastruktur Digital dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang terukur dan objektif mengenai tingkat integritas penyelenggaraan layanan infrastruktur digital sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Hasil pengukuran IIPP dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan dalam proses pelayanan, sekaligus sebagai bahan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola layanan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan publik berbasis digital.

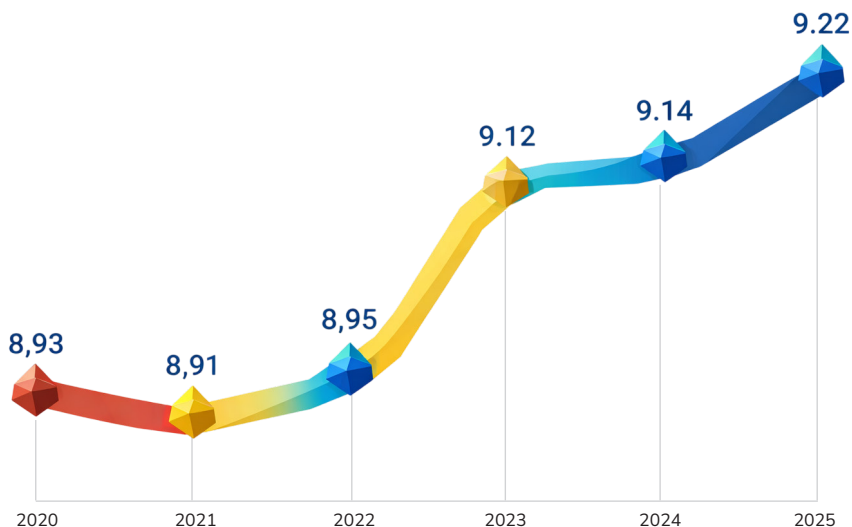
Indeks Integritas Pelayanan Publik memperlihatkan gambaran besaran tingkat konsistensi pejabat/petugas unit layanan publik di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam melaksanakan

peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan berdasarkan parameter dan standar integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. IIPP dilakukan pengukuran dengan melibatkan tiga pihak yaitu:

Pihak Eksternal	Pihak Internal	Pakar
Penilaian oleh pengguna layanan atas indikator seperti diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, dan percaloan/ perantara tidak resmi	Pegawai Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital untuk penilaian terhadap budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran, yang menggambarkan capaian sistem pencegahan dan penerapan antikorupsi di instansi	Para ahli atau orang-orang yang memahami layanan publik di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, penilaian terhadap transparansi dan sistem antikorupsi

Capaian Target

Capaian IIPP Periode 2022–2025



Gambar 5. Grafik Capaian IIPP Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Periode 2022–2025

Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) disusun berdasarkan sejumlah indikator kunci yang mencerminkan potensi risiko integritas serta kualitas tata kelola pelayanan. Indikator-indikator ini mengacu pada komponen survei yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021. Komponen survei yang digunakan sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pelayanan

Untuk memastikan bahwa unit kerja memberikan pelayanan dengan tidak membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

2. Kecurangan Pelayanan

Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan.

3. Menerima Imbalan dan/atau Gratifikasi

Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku.

4. Percaloan

Memastikan bahwa unit kerja tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan dan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

5. Pungutan Liar

Memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja.

Tabel 2. IIPP Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025

No	Indikator	Skala 1–10
1.	Diskriminasi Pelayanan	9,12
2.	Pelayanan Diluar Prosedur	9,16
3.	Penerimaan Imbalan	9,18
4.	Pungutan Liar	9,33
5.	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	9,33
IIPP Layanan Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Digital serta Kalibrasi Alat Ukur		9,22

Capaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan menentukan persepsi masyarakat terhadap integritas layanan. Budaya kerja aparatur, seperti profesionalisme, etika, disiplin, dan komitmen terhadap kepuasan masyarakat, dibangun dari salah satu instrumen yaitu *public announcement* terkait anti-gratifikasi. Pengumuman disiarkan setiap hari sebagai pengingat akan larangan penerimaan gratifikasi

dan pentingnya akuntabilitas. Instrumen ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas secara etis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik yang berintegritas. Lebih lanjut, bentuk pengawasan internal yang telah berjalan selama ini yaitu pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan *whistleblowing system*, dipantau dan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.



Pemanfaatan aplikasi SOP digital menjadi salah satu bentuk pengawasan internal lain di mana pengelolaan SOP sebagai pedoman baku bagi setiap aktivitas pelayanan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sehingga SOP diimplementasikan secara konsisten, prosedur layanan menjadi transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Setiap pegawai yang menjalankan tugas sesuai standar yang telah diterapkan akan memperkuat budaya kerja yang berintegritas, di mana konsistensi penerapan SOP berfungsi untuk memastikan bahwa setiap layanan diselenggarakan secara adil, transparan, sesuai aturan, serta meniadakan perbedaan perlakuan terhadap pengguna layanan.

Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Keberhasilan ini didapat dari berbagai strategi upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam meningkatkan layanan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil:

Dari Sisi Pelayanan

Revisi Juknis Pelayanan:

- Melakukan evaluasi dan revisi terhadap petunjuk pelaksanaan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan aplikasi dan memastikan proses pelayanan berjalan lebih efisien.
- Memastikan petunjuk pelaksanaan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi aplikasi.

Pengoptimalan Sistem Layanan *Online*:

- Memperbarui sistem layanan *online* agar lebih responsif dan mudah diakses oleh aplikasi.
- Memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan aplikasi melakukan pengujian secara daring dan mengakses hasil pengujian secara *real-time*.

Peningkatan Komunikasi dengan Aplikasi:

- Meningkatkan komunikasi proaktif dengan aplikasi terkait status pengujian, persyaratan, dan informasi lainnya.
- Memberikan bantuan yang lebih baik melalui saluran komunikasi yang beragam, seperti layanan *online* (WhatsApp, e-mail, telepon).

Pelayanan Konsultasi:

- Menyediakan layanan konsultasi aktif kepada aplikasi untuk membantu mereka memahami persyaratan pengujian dan regulasi yang berlaku.

Implementasi Nilai BerAKHLAK

Penerapan nilai BerAKHLAK dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Infrastruktur Digital berperan signifikan dalam meningkatkan Indeks Integritas Pelayanan Publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan tercapainya target indikator kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan infrastruktur digital yang transparan, mudah diakses, dan berkeadilan. Setiap proses pelayanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang jelas, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang berdampak positif terhadap capaian Indeks Integritas Pelayanan Publik.

Penerapan nilai Akuntabel tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja. Pengelolaan anggaran, pengadaan, serta pengawasan layanan infrastruktur digital dilakukan secara terbuka dan terukur, sehingga mendukung peningkatan nilai IIPP dan pencapaian indikator kinerja secara berkelanjutan.

Nilai Kompeten diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami regulasi, etika pelayanan publik, serta penguasaan teknologi digital. Aparatur yang kompeten mampu memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan standar integritas, sehingga mencegah terjadinya maladministrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola layanan.

BerAKHLAK # Bangga Melayani Bangsa



Berorientasi Pelayanan

Ketika melayani, Anda memahami kebutuhan publik



Akuntabel

Anda bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil



Kompeten

Anda selalu berupaya untuk belajar dan mengembangkan diri



Harmonis

Anda mampu bekerja sama dan menghargai perbedaan



Loyal

Anda menunjukkan komitmen dan kesetiaan pada bangsa dan negara



Adaptif

Anda mampu mengantisipasi perubahan dan merespons dengan cepat



Kolaboratif

Anda bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan karya terbaik

Nilai Harmonis tercermin dari terciptanya hubungan kerja yang saling menghargai antar pegawai serta komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan. Lingkungan kerja yang harmonis mendukung penerapan nilai integritas, memperkuat budaya kerja positif, dan mendorong pelayanan yang profesional dan beretika.

Penerapan nilai Loyal diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, komitmen pada kebijakan pimpinan, dan konsistensi dalam menjaga integritas pelayanan publik. Loyalitas aparatur menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap layanan infrastruktur digital berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Nilai Adaptif diimplementasikan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan digital, termasuk dalam penerapan sistem layanan berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel. Inovasi layanan digital turut mendukung penguatan pengawasan dan pengendalian internal, sehingga meningkatkan integritas pelayanan.

Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan unit kerja terkait, aparat pengawasan internal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penguatan integritas dan pencegahan praktik penyimpangan. Kolaborasi ini berkontribusi pada efektivitas pengelolaan layanan dan pencapaian target indikator kinerja IIPP.

Penghargaan: PEKPPP Tahun 2025



© 2026 HUMAS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital kembali mendapatkan penghargaan dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan secara mandiri di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital meraih Peringkat 2 dari seluruh Unit Lokus Evaluasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Indeks Pelayanan Publik 4,97 dengan kategori A dan predikat Pelayanan Prima. Ketercapaian ini diupayakan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung, perbaikan kualitas unsur pelayanan secara rutin, serta partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder* dalam kegiatan konsultasi publik.



IKSK 1.3

Persentase (%) Capaian Target PNBP Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital	Persentase (%) Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Infrastruktur Digital	Rp19.840.818.202.000	Rp72.288.000.000 (hanya capaian BP2KOMDIGI)

Latar Belakang/Maksud dan Tujuan Sasaran kegiatan

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) telah melaksanakan transformasi layanan pengujian perangkat telekomunikasi dan digital secara terencana dan berkelanjutan sejak tahun 2023. Transformasi ini menjadi fondasi utama dalam penguatan peran BP2KOMDIGI sebagai unit pelaksana teknis yang menyediakan layanan pengujian perangkat digital yang handal, berstandar internasional, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencapaian peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Capaian strategis pada tahun 2023 ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana utama berupa alat ukur Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK bertaraf internasional yang berlokasi di Tapos, Depok, Jawa Barat, serta terlaksananya relokasi kegiatan laboratorium dari Bintara ke Tapos. Pemenuhan sarana pengujian ini secara langsung meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan pengujian BP2KOMDIGI, sehingga mampu memperluas jenis layanan serta meningkatkan volume dan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi dan digital.

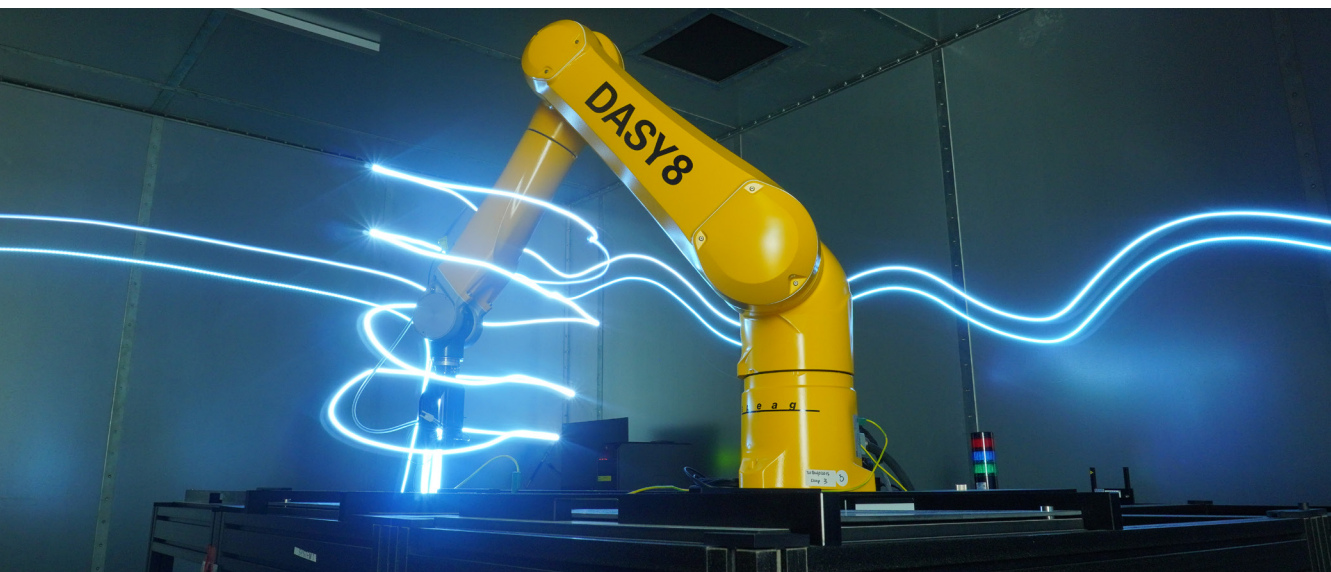
Dengan tersedianya fasilitas pengujian *full compliance*, BP2KOMDIGI tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pengujian eksisting, tetapi juga mengakomodasi kewajiban pengujian baru yang diamanatkan oleh regulasi.

Salah satu capaian kinerja penting adalah terselenggaranya layanan pengujian *Specific Absorption Rate* (SAR) sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan *Specific Absorption Rate* pada Perangkat Telekomunikasi Telepon

Selular dan Komputer Tablet. Pelaksanaan pengujian SAR ini memperkuat peran BP2KOMDIGI yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari dampak penggunaan perangkat telekomunikasi serta peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital. Melalui pengujian SAR, BP2KOMDIGI memastikan bahwa perangkat yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi ambang batas radiasi sesuai ketentuan *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP).

Selain mendukung aspek perlindungan masyarakat (*protect*), penguatan layanan pengujian juga memberikan dampak positif terhadap aspek tata kelola dan kinerja keuangan negara. Pelaksanaan layanan sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi telah didukung oleh kebijakan pentarifan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023. Dengan adanya kepastian tarif, BP2KOMDIGI mampu mengoptimalkan kontribusinya untuk optimalisasi PNBP Bidang Infrastruktur Digital, sejalan dengan peningkatan volume layanan dan perluasan jenis dan ruang lingkup pengujian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP2KOMDIGI melalui transformasi sarana prasarana, penguatan kapasitas pengujian, serta pengembangan layanan strategis seperti pengujian SAR telah memberikan kontribusi nyata. Capaian ini menunjukkan bahwa BP2KOMDIGI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin kualitas perangkat TIK, melindungi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital nasional.



Berikut ini adalah capaian PNBP Balai Uji dari tahun 2017–2025:



Berdasarkan data pada tabel, kinerja penerimaan PNBP BP2KOMDIGI menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2018 terjadi penurunan realisasi PNBP. Penurunan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki BP2KOMDIGI pada saat itu, yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengujian perangkat telekomunikasi secara *full compliance* sesuai dengan persyaratan regulasi yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jenis layanan pengujian yang dapat diberikan, sehingga berpengaruh langsung terhadap volume layanan dan penerimaan PNBP.

Seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana pengujian, khususnya melalui pengembangan fasilitas laboratorium bertaraf internasional, kinerja penerimaan PNBP kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, BP2KOMDIGI menetapkan target PNBP sebesar Rp10.575.000.000. Hingga akhir tahun, realisasi PNBP yang berhasil dicapai sebesar Rp36.517.158.000 atau setara 345,42% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja penerimaan yang sangat optimal dan menunjukkan keberhasilan BP2KOMDIGI dalam meningkatkan volume layanan pengujian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

Peningkatan penerimaan PNBP tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan pengujian BP2KOMDIGI. Hal ini memperkuat relevansi indikator Jumlah Penerimaan PNBP Bidang Pengujian Perangkat di BP2KOMDIGI sebagai indikator kinerja utama, karena secara langsung mengukur efektivitas layanan pengujian sekaligus kontribusi nyata BP2KOMDIGI terhadap penerimaan negara bukan pajak.

Indikator ini menjadi sangat penting karena layanan pengujian perangkat merupakan *core business* BP2KOMDIGI. Setiap layanan pengujian menghasilkan laporan hasil uji yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi perangkat telekomunikasi dan digital, yang secara langsung berkontribusi terhadap PNBP. Dengan demikian, peningkatan penerimaan PNBP merefleksikan peningkatan jumlah dan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Capaian Target

Pada tahun 2025, seiring dengan peningkatan kapasitas layanan dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, target PNBП ditetapkan sebesar Rp27.880.000.000. Hingga periode pelaporan, realisasi PNBП tercatat sebesar Rp72.288.000.000 atau 259% dari target. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja PNBП BP2KOMDIGI tetap berada pada tren sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan tren peningkatan kinerja PNBП serta potensi layanan BP2KOMDIGI, pada tahun 2026 ditetapkan target PNBП sebesar Rp54.000.000.000. Penetapan target ini merupakan bentuk komitmen peningkatan kinerja dan optimisme terhadap keberlanjutan capaian PNBП, sejalan dengan penguatan kapasitas layanan, peningkatan kualitas pengujian, serta perluasan jenis layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Secara keseluruhan, capaian PNBП BP2KOMDIGI pada periode 2024–2025 serta penetapan target 2026 menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja yang signifikan dan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan PNBП dan kesiapan BP2KOMDIGI dalam mendukung penerimaan negara. Adapun beberapa hal yang menjadi strategi ke depan dalam rangka perbaikan perbaikan untuk mencapai indikator ini di antaranya:



Dari Sisi Laboratorium

1. Revisi Juknis Pengujian dan Prosedur Laboratorium:

- Melakukan evaluasi dan revisi juknis pengujian serta prosedur laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengujian.
- Memastikan bahwa pedoman laboratorium selalu terkini dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Percepatan Proses Pengujian:

- Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat mempercepat proses pengujian tanpa mengorbankan kualitas hasil.
- Menggunakan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengujian.

3. Pelatihan dan Pengembangan Penguji:

- Memberikan pelatihan reguler kepada penguji laboratorium agar tetap terampil dan berpengetahuan dalam menghadapi perubahan teknologi.
- Mendorong penggunaan teknologi terbaru dalam laboratorium.

4. Kemitraan dengan Industri:

- Membangun kemitraan dengan industri telekomunikasi untuk memahami kebutuhan pengujian yang mendesak dan mendapatkan masukan terkait pengembangan laboratorium.

5. Monitoring Kinerja dan Evaluasi Rutin:

- Melakukan pemantauan kinerja laboratorium secara rutin untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil.

Dari Sisi Marketing

Peningkatan Promosi Layanan:

1. **Sosialisasi yang Intensif:** Tim pengembangan layanan telah melakukan sosialisasi secara intensif mengenai layanan pengujian kepada target pasar. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti seminar, *workshop*, kunjungan langsung, kampanye digital, dan penyebaran informasi melalui brosur, *flyer*, dan presentasi langsung kepada calon pelanggan.
2. **Studi Kompetitor:** Melakukan analisis mendalam terhadap layanan dan harga kompetitor, kemudian menyusun strategi diferensiasi yang menarik.
3. **Identifikasi Target Pasar:** Membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik untuk memudahkan penentuan strategi pemasaran yang tepat sasaran.
4. **Kolaborasi dengan Mitra Strategis:** Menjalinkan kerja sama dengan target pasar yang potensial terhadap peningkatan PNBPNP.
5. **Analisa Tarif:** Kemudahan dalam sistem pentarifan terkait tarif pengujian yaitu tarif volite, yaitu fleksibilitas terkait tarif pengujian dan dapat menyesuaikan tarif dengan kondisi pasar, dan terkait tarif ini melalui proses survei dan juga pembahasan secara intensif dengan Kementerian Keuangan RI.

Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dengan mencapai persentase pencapaian sebesar 345,32%, BP2KOMDIGI membuktikan keberhasilan dalam manajemen yang cermat dan strategis serta kebijakan yang membuat BP2KOMDIGI sebagai pilihan laboratorium terlengkap untuk pengujian perangkat telekomunikasi. Peningkatan ini menggambarkan kemampuan BP2KOMDIGI untuk mengelola PNBPNP dengan efektif.

BP2KOMDIGI tetap berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada aplikasi. Peningkatan pencapaian target ini mencerminkan respons positif terhadap upaya BP2KOMDIGI dalam meningkatkan kualitas pengujian dan kalibrasi. Evaluasi kinerja rutin dan umpan balik aplikasi menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi.

Persentase Pencapaian

$$\text{Persentase Pencapaian} = (\text{Pencapaian} / \text{Target}) \times 100$$

Dengan menerapkan rumus tersebut:

$$\text{Persentase Pencapaian} = (72.288.000.000 / 27.880.000.000) \times 100 = 259\%$$

Pencapaian ini tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui sebesar 259%. Hal ini mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam manajemen serta pelaksanaan pengujian perangkat di laboratorium BP2KOMDIGI.

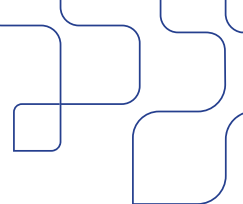
Kesimpulan dan Rencana Ke Depan

Keberhasilan pencapaian target ini menunjukkan bahwa rencana dan strategi yang diterapkan berhasil. Dalam konteks finansial, pencapaian di atas target ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pencapaian sebesar 259% ini dianggap sebagai capaian yang membanggakan dan menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang dapat diterapkan pada periode berikutnya:

Untuk ke depannya, BP2KOMDIGI akan:

1. Terus meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
2. Melakukan evaluasi dan pembaruan rutin terhadap proses pengujian dan kalibrasi.
3. Memperluas jangkauan layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas.

Dengan komitmen dan dedikasi, BP2KOMDIGI optimis dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di masa depan.



Implementasi Nilai BerAKHLAK

Penerimaan PNBPN merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bidang Infrastruktur Digital dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola yang baik serta berlandaskan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang mudah, transparan, dan tepat waktu kepada para pengguna layanan infrastruktur digital. Proses pemungutan PNBPN dilakukan dengan memberikan kepastian layanan, kejelasan tarif, serta kemudahan akses pembayaran, sehingga mendorong kepatuhan pengguna layanan dan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan PNBPN.

Penerapan nilai Akuntabel tercermin dalam pengelolaan penerimaan PNBPN yang dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan mulai dari penetapan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PNBPN dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung pencapaian target indikator kinerja penerimaan.

Nilai Kompeten diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan PNBPN, baik dari aspek pemahaman regulasi, sistem keuangan negara, maupun pemanfaatan teknologi digital. Aparatur yang kompeten mampu memastikan penerimaan PNBPN dikelola secara profesional dan optimal sesuai potensi yang ada.

Nilai Harmonis tercermin dari terjalinnya hubungan kerja yang baik antar unit terkait dalam pengelolaan PNBPN, serta komunikasi yang efektif dengan pengguna layanan. Lingkungan kerja yang harmonis mendukung kelancaran proses pelayanan dan pengelolaan penerimaan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Nilai Loyal diwujudkan melalui komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan PNBPN serta kepatuhan terhadap peraturan dan arahan pimpinan. Loyalitas ini menjadi dasar dalam menjaga integritas dan konsistensi pengelolaan penerimaan negara di Bidang Infrastruktur Digital.

Nilai Adaptif diimplementasikan dengan pemanfaatan sistem pembayaran dan pelaporan berbasis digital serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan dinamika layanan infrastruktur digital. Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi mendukung peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam realisasi penerimaan PNBP.

Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan unit keuangan, pengawasan internal, serta pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi potensi PNBP. Kolaborasi ini memperkuat pengendalian, meningkatkan kepatuhan, dan mendorong tercapainya target indikator kinerja penerimaan secara berkelanjutan.



IKSK 1.4

Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur	96%	99,43%

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan/Sasaran Kegiatan

Sebagai laboratorium yang bergerak di bidang pengujian dan kalibrasi, indikator pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) dalam proses pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur merupakan hal penting dan signifikan dalam hal menjamin kualitas pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital.

Dengan adanya indikator SLA ini para pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) bisa mendapatkan informasi yang tepat guna memastikan keamanan, keandalan, efisiensi dan kepatuhan terhadap standar perangkat yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam melakukan proses pengujian dan kalibrasi.

Secara teknis dalam proses berjalannya pengujian dan kalibrasi terdapat ragam permasalahan yang cukup kompleks, misalnya bagaimana laboratorium dapat menjaga apakah pengujian dan kalibrasi yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional; bagaimana kontrol keamanan dalam proses pengujian dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium; serta bagaimana menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan dalam proses tersebut. Sehingga salah satu yang dapat dilakukan oleh laboratorium adalah dengan memunculkan suatu indikator yang dapat melakukan pengawasan terhadap hal di atas maka dari itu muncul indikator pemenuhan SLA dalam proses pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur.

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*) Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur, seperti beberapa kapasitas laboratorium yang lebih kecil daripada

jumlah permohonan yang masuk, terdapat permasalahan perangkat yang dilakukan pengujian karena beberapa kondisi yang diharuskan dalam proses pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur (berkas bermasalah), keterbatasan jumlah personel pengujian dibandingkan dengan jumlah pengujian yang masuk sampai pada permasalahan waktu masuk pengujian yang berada pada akhir tahun berjalan sehingga menurut penjadwalan memang terselesaikan pada tahun berikutnya.

Secara sederhana, Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur pada tahun berjalan (2025) adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Jumlah Pengujian masuk}) - (\text{Jumlah pengujian terselesaikan}))}{(\text{Jumlah pengujian masuk}) * 100\%}$$

dari hasil tersebut akan didapatkan gambaran tentang persentase nilai indikator pemenuhan SLA (Service Level Agreement) dalam proses pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur.

Capaian Target

Capaian indikator kinerja Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur diukur menggunakan formulasi perbandingan antara jumlah laporan hasil uji dan hasil kalibrasi yang diselesaikan sesuai standar waktu layanan dengan total jumlah permohonan pengujian dan kalibrasi pada tahun berjalan.

Di bawah ini merupakan jumlah permohonan dan laporan hasil uji/kalibrasi selama tahun 2025:

Bulan	Akumulasi Permohonan	Akumulasi LHU dan LHK	%
Januari	88	67	76,14
Februari	207	188	90,82
Maret	306	306	100,00
April	419	379	90,45
Mei	619	602	97,25
Juni	798	783	98,12
Juli	999	977	97,80
Agustus	1.157	1.131	97,75
September	1.336	1.287	96,33
Oktober	1.551	1.488	95,94
November	1.764	1.680	95,24
Desember	1.934	1.923	99,43

Realisasi capaian indikator Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur pada tahun 2025 mencapai 99,43% melampaui target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 96%. Dengan menyelesaikan 1.923 Laporan Hasil Uji dan Laporan Hasil Kalibrasi dibandingkan dengan 1.934 jumlah permohonan yang masuk di mana sisa permohonan masuk yang belum diselesaikan tersebut akan diselesaikan di tahun 2026 karena permohonan masuk berada di minggu ke-2–3 bulan Desember 2025.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui optimalisasi proses bisnis, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam sistem layanan pengujian, serta penguatan manajemen antrian dan monitoring penyelesaian layanan.

Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam pencapaian target Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian target di tahun 2025 antara lain:

- a. Perkembangan teknologi;
- b. Perubahan standar dan regulasi yang terjadi di tahun berjalan;
- c. Jumlah kapasitas pengujian yang kurang memadai;
- d. Lokasi pengujian (*on-site test*) yang cukup beragam.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan pencapaian target Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat ukur dapat terpenuhi, yaitu:

- a. Melakukan prediksi arah perkembangan teknologi;
- b. Melakukan *update* dan pengecekan secara berkala terhadap perubahan standar dan regulasi;
- c. Menambah jumlah kapasitas pengujian yang ada;
- d. Mempelajari lokasi pengujian (*on-site test*) dan memberikan pelatihan terhadap setiap personel.

Implementasi Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya meningkatkan kinerja layanan pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur, penerapan nilai-nilai berAKHLAK menjadi landasan utama untuk memastikan terpenuhinya target *Service Level Agreement* (SLA) secara optimal.

1.

Nilai Berorientasi Pelayanan di mana capaian yang didapat dalam Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur merupakan bukti nyata dan komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.

Akuntabel dapat diwujudkan dengan melaporkan proses dan hasil pengujian sesuai dengan hasil yang didapatkan tanpa dipengaruhi perihal apapun sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.

3.

Kompeten dalam pemenuhan SLA ini menuntut personel yang terlibat memiliki keahlian teknis yang mumpuni agar dalam proses pelaksanaan pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur dapat sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

4.

Harmonis dibangun dari kerja sama tim yang solid dan harmonis sangat menentukan kecepatan proses pengujian perangkat digital dan kalibrasi alat ukur sehingga dapat memenuhi target SLA yang telah ditetapkan.

5.

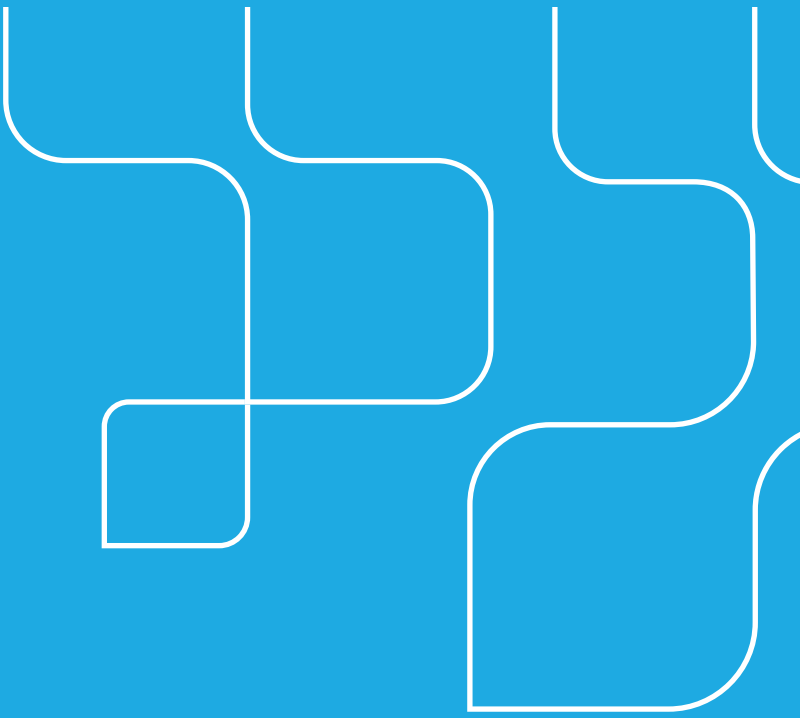
Loyal di mana setiap proses pemenuhan persentase (%) SLA selalu sesuai dengan standar, regulasi serta aturan yang ada demi bangsa dan negara.

6.

Adaptif menyesuaikan terhadap perubahan teknologi, standar maupun regulasi yang ada dalam pelaksanaan proses pemenuhan persentase (%) SLA.

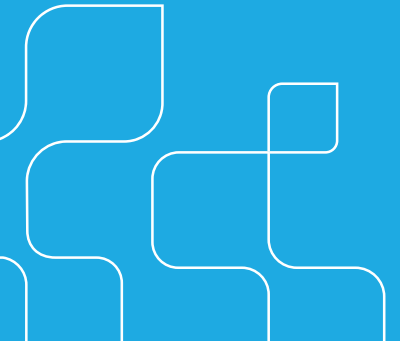
7.

Terakhir, Kolaboratif dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pemastian mutu pengujian, koordinasi antara bagian penerimaan sampel, teknisi, dan bagian administrasi sangat krusial dalam mencapai target waktu.



Sasaran **Kegiatan 2 -**

Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan
Teknologi Pengujian Melalui Kerja Sama
Sesuai Standar Internasional



IKSK 2.1

Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BP2KOMDIGI yang Efisien dan Efektif	Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI	85,00	83,73

Pengaturan mengenai perencanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mulai diterapkan dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dan dilanjutkan pada tahun 2025. PMK tersebut merupakan sinergi Monev DJA dan DJPB dalam meningkatkan kualitas belanja. Menindaklanjuti amanat dalam PMK 62 tersebut, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 terkait Pedoman Teknis pelaksanaan PPKA dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran. Dengan KMK tersebut, penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA), sedangkan efektivitas dan efisiensi menjadi fokus di DJA (Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA). Kategori Nilai Kinerja Anggaran mulai dari Sangat Kurang sampai Sangat Baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai	Kategori
0–50	Sangat Kurang
> 50–60	Kurang
> 60–80	Cukup
> 80–90	Baik
> 90–100	Sangat Baik

Adapun capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BP2KOMDIGI Tahun 2025 adalah 83,73 dengan kategori Baik, terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

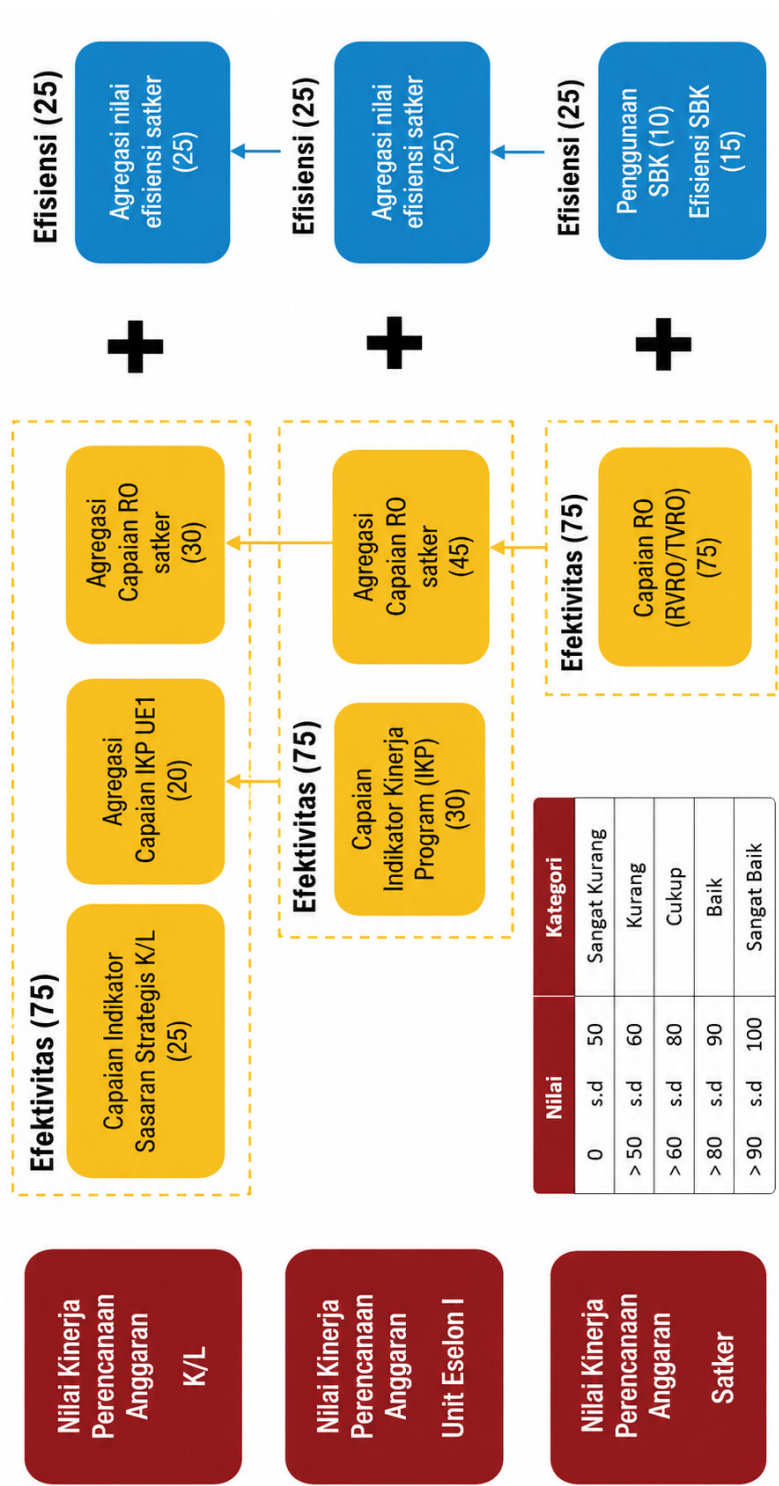
$$50\% * \text{NK Perencanaan DIPA Baru} + 50\% * \text{NK Pelaksanaan (Rata-rata Baru+Lama)}$$

Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 85,00. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya nilai pada aspek perencanaan, karena belum diterapkannya Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Akibatnya, variabel efisiensi dalam pengukuran NKA belum dapat dinilai secara maksimal dikarenakan saat ini BP2KOMDIGI belum menggunakan RO SBKK di tahun 2025. Meskipun demikian, usulan penerapan SBKK untuk kegiatan kalibrasi lapangan di Pulau Jawa telah diajukan melalui DJID dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga, diharapkan di tahun 2026 BP2KOMDIGI sudah dapat menggunakan RO SBKK tersebut. Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 BP2KOMDIGI dengan mengusulkan usulan RO SBKK melalui Nota Dinas kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital,

Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) dan EKA Perencanaan Anggaran

PPKA berguna antara lain memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Ruang lingkup terdiri dari kualitas informasi kinerja meliputi ketersediaan dan kelengkapan informasi kinerja dalam dokumen, kejelasan informasi kinerja, relevansi dan keterukuran.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran terdiri dari variabel efektivitas yakni capaian Rincian Ouput (RO) dikaitkan dengan IKP dan ISS, serta efisiensi yakni penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Efisiensi SBK. Capaian RO (RVRO/TVRO) memiliki bobot maksimal 75, penggunaan SBK bobot maksimal 10, dan efisiensi SBK bobot maksimal 15. Capaian per RO yaitu membandingkan antara Realisasi Volume RO dengan Target RO selanjutnya dihitung rata-rata aritmatik capaian per RO, sedangkan Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran Khusus/SBKK dan Standar Biaya Keluaran Umum/SBKU) adalah menghitung jumlah RO menggunakan SBK dibandingkan jumlah RO keseluruhan, dan efisiensi SBK adalah membandingkan hasil pengurangan antara Indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK.



*Materi Kebijakan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024, disampaikan pada tanggal 24 September 2024

Hasil RVRO BP2KOMDIGI pada akhir Desember 2025 adalah seluruh RO mencapai target sesuai TVRO yang ditetapkan, sehingga mencapai Nilai Maksimal 100 untuk variabel Capaian RO (75%). Sedangkan untuk SBK, pada tahun 2025 BP2KOMDIGI belum menggunakan baik SBKU dan SBKK sehingga tidak memperoleh nilai untuk variabel penggunaan SBK dan efisiensinya.



Gambar 6. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA

Nilai IKPA pada akhir Desember 2025 adalah 93,53, terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran (25%) dengan nilai 95,32 meliputi Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA; Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%) dengan nilai 91,17 meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP; serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian Output (25%) dengan nilai 100. Dispensasi SPM merupakan faktor pengurang dalam penghitungan nilai akhir, dalam hal ini tidak ada dispensasi tersebut.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sektor	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1.	023	059	694729	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL	Nilai	100,00	90,68	84,68	80,00	100,00	100,00	100,00	93,54	100%	0,00	93,54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,60	16,94	8,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	95,34		91,17				100,00				

Sasaran Kegiatan

Sasaran terwujudnya tata kelola administrasi BP2KOMDIGI yang efisien dan efektif pada tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BP2KOMDIGI tidak terpenuhi yaitu 83,73 dari target 85 pada Perjanjian Kinerja BP2KOMDIGI.

Capaian Target

Capaian 83,73 adalah penghitungan secara bobot untuk tahun berjalan (2025) dengan perhitungan sebagai berikut:

NKA DIPA lama:

Nilai Perencanaan Anggaran: 75,00

Nilai Pelaksanaan Anggaran: 91,36

NKA DIPA baru:

Nilai Perencanaan Anggaran: 75

Nilai Pelaksanaan Anggaran: 93,54

Nilai Kinerja Anggaran: 43,51

Perhitungan NKA bulan Desember:

$50\% \times \text{NK Perencanaan DIPA Baru} + 50\% \times \text{NK Pelaksanaan (Rata-rata Baru+Lama)}$

$50\% \times 75 + 50\% \times \{(91,36 + 93,54) / 2\} = 37,5 + 46,23 = 83,73$

Tahun 2021 NKA BP2KOMDIGI adalah 93,24 terdiri dari nilai SMART 96,71 dan nilai IKPA 88,04; tahun 2022 adalah 83,00 terdiri dari nilai SMART 79,68 dan nilai IKPA 88,24; dan tahun 2023 NKA BP2KOMDIGI mencapai 87 terdiri dari nilai SMART 86,42 dan nilai IKPA 87,50. Untuk tahun 2024, NKA BP2KOMDIGI adalah 85,13.

NKA BP2KOMDIGI NILAI KINERJA ANGGARAN

Komponen NKA: Nilai SMART dan Nilai IKPA



Implementasi Nilai BerAKHLAK

Implementasi nilai berAKHLAK untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran, adalah sebagai berikut:

Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal serta memastikan *output* layanan dapat dirasakan secara langsung.

Nilai **Akuntabel** tercermin dalam pengelolaan anggaran yang transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. BP2KOMDIGI memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran terdokumentasi dengan baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai NKA.

Nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pemahaman terhadap regulasi, penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung. Hal ini bertujuan agar perencanaan dan realisasi anggaran dapat dilakukan secara tepat dan berkualitas.

Nilai **Harmonis** diwujudkan melalui sinergi dan komunikasi yang baik antar unit kerja dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kolaborasi yang solid memungkinkan penyelarasan program dan kegiatan sehingga meminimalkan potensi kendala yang dapat memengaruhi capaian kinerja anggaran.

Nilai **Loyal** ditunjukkan dengan komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan kebijakan organisasi dan mendukung pencapaian target kinerja instansi. Setiap individu berperan aktif menjaga integritas dan reputasi BP2KOMDIGI dalam pengelolaan keuangan negara.

Nilai **Adaptif** diimplementasikan melalui kemampuan organisasi dalam merespons perubahan kebijakan dan dinamika pengelolaan anggaran, termasuk penyesuaian terhadap regulasi baru seperti penerapan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Inovasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Nilai **Kolaboratif** diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti kementerian/lembaga terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Kolaborasi ini mendukung peningkatan kualitas perencanaan serta optimalisasi capaian NKA.

IKSK 2.2

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BP2KOMDIGI yang Efisien dan Efektif	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97,00	100,00

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BP2KOMDIGI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BP2KOMDIGI. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan BP2KOMDIGI Per 31 Desember 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.360.609 yang berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp68.341.173.573 yaitu 71,30% dari alokasi anggaran sebesar Rp95.852.015.000 atau sebesar 98,21% dari pagu anggaran dikurangi blokir sebesar Rp26.264.024.000.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp663.921.188.298 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp739.862.501, Aset Tetap (netto) sebesar Rp657.731.188.725 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.450.137.072. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.551.467.029 dan Rp659.369.721.269.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.693.403; sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp91.579.894.448 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(91.564.201.045). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.385.873 dan sebesar Rp0; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(91.558.815.172).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(91.558.815.172) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp750.928.536.441 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp659.369.721.269.

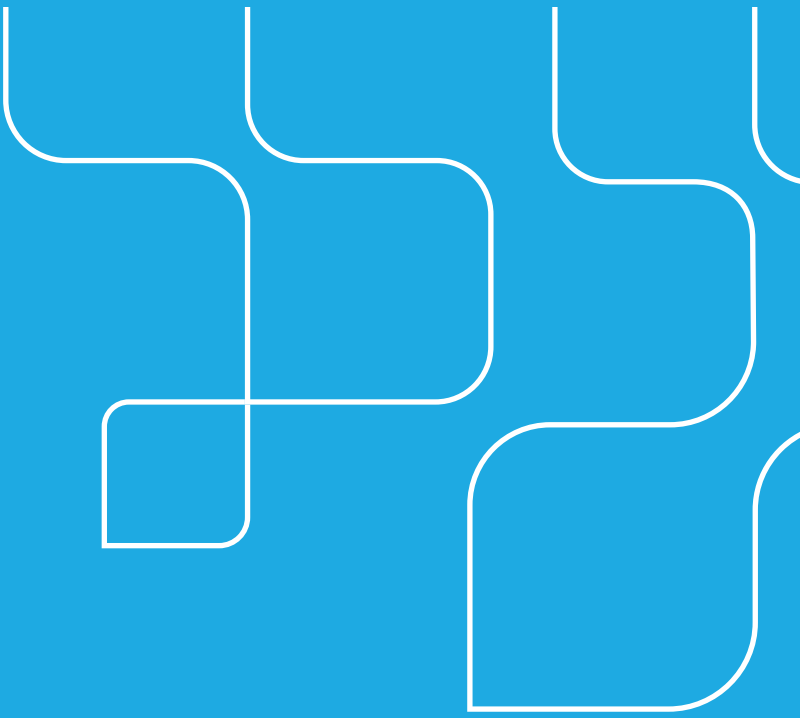
Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

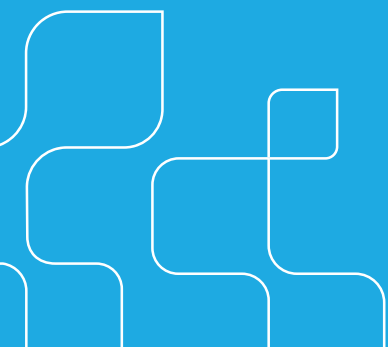


Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.





Kinerja **Lainnya**



Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK

Latar Belakang

Specific Absorption Rate (SAR) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan energi gelombang radio oleh tubuh manusia akibat penggunaan perangkat telekomunikasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital, khususnya perangkat nirkabel berbasis seluler dan teknologi *broadband*, pengujian SAR menjadi aspek krusial dalam menjamin keselamatan masyarakat dari paparan radiasi elektromagnetik.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan pengujian perangkat telekomunikasi dan digital, termasuk pengujian keselamatan radiasi. Hingga sebelum tahun 2025, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah memiliki tiga unit *SAR Test System* yang digunakan untuk mendukung layanan pengujian. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan pengujian, perkembangan teknologi perangkat, serta tuntutan waktu layanan yang semakin cepat, kapasitas tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menambah kapasitas pengujian SAR agar mampu mengakomodasi peningkatan beban kerja serta menjaga kualitas dan ketepatan waktu layanan pengujian. Selain itu, perangkat telekomunikasi generasi terbaru memerlukan sistem pengujian yang semakin presisi dan andal sesuai standar internasional.

Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilaksanakan pengadaan satu unit tambahan *SAR Test System*, sehingga secara keseluruhan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital kini memiliki empat *SAR Test System*. Penambahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas laboratorium, meningkatkan kontinuitas layanan, serta mendukung perlindungan keselamatan masyarakat sebagai pengguna akhir perangkat telekomunikasi.

Penerima manfaat dari kinerja ini yakni masyarakat umum, pelaku industri perangkat telekomunikasi dan digital, serta regulator yang membutuhkan hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penambahan satu unit *SAR Test System* memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas layanan pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital. Dengan bertambahnya

jumlah sistem yang tersedia, laboratorium memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengatur jadwal pengujian dan mengurangi potensi antrean layanan.

Dari sisi perlindungan masyarakat, ketersediaan sistem pengujian SAR yang memadai memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar telah memenuhi aspek keselamatan radiasi. Secara tidak langsung, hal ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pengujian yang dilakukan oleh pemerintah.

Analisa Keberhasilan dan Analisa Kegagalan

Secara global, pengujian SAR merupakan salah satu elemen utama dalam pengujian keselamatan perangkat telekomunikasi. Laboratorium pengujian yang memiliki jumlah sistem SAR yang memadai akan lebih mampu menjawab kebutuhan industri dan regulator secara berkelanjutan.

Dengan bertambahnya jumlah *SAR Test System* menjadi empat unit pada tahun 2025, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital mengalami peningkatan kapasitas yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat posisi laboratorium dalam mendukung pengujian perangkat telekomunikasi yang semakin beragam dan kompleks, serta mendekatkan standar layanan pengujian nasional dengan praktik terbaik di tingkat regional.

Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil pelaksanaan pengadaan tambahan *SAR Test System* telah ditindaklanjuti dengan pemanfaatan sistem untuk mendukung layanan pengujian yang berkelanjutan. Laporan kinerja ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan lanjutan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fasilitas laboratorium serta peningkatan kualitas layanan pengujian.

Rekomendasi Perbaikan Tahun Sebelumnya

Ke depan, diperlukan penguatan pemanfaatan seluruh *SAR Test System* secara optimal melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap kinerja peralatan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan pengujian yang andal dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Efisiensi Sumber Daya

Penambahan *SAR Test System* memberikan efisiensi dalam hal waktu layanan dan pengelolaan kapasitas pengujian. Dengan meningkatnya kapasitas internal, ketergantungan terhadap pengaturan jadwal yang ketat dapat dikurangi, sehingga layanan pengujian dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Implementasi Nilai BerAKHLAK

Implementasi nilai-nilai berAKHLAK dalam kinerja pengadaan dan pemanfaatan tambahan *SAR Test System* tercermin secara nyata melalui serangkaian proses yang terencana, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Seluruh tahapan kegiatan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan.

Nilai **Berorientasi Pelayanan** terlihat jelas dari tujuan utama pengadaan *SAR Test System*, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan keselamatan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem tambahan ini, kemampuan dalam melakukan pengujian, pemeliharaan, serta kesiapsiagaan peralatan SAR menjadi lebih optimal. Dampaknya, respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat dalam menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.

Selanjutnya, nilai **Akuntabel** diwujudkan melalui pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, hingga pemanfaatan sistem, dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi kegiatan disusun secara sistematis, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan. Hal ini memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Nilai **Kompeten** tercermin dari keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dalam mengelola *SAR Test System*. Personel yang bertanggung jawab telah mendapatkan pelatihan khusus, sehingga mampu mengoperasikan, merawat, dan mengoptimalkan fungsi sistem secara profesional. Selain itu, adanya

peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pembelajaran teknis menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas kinerja serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

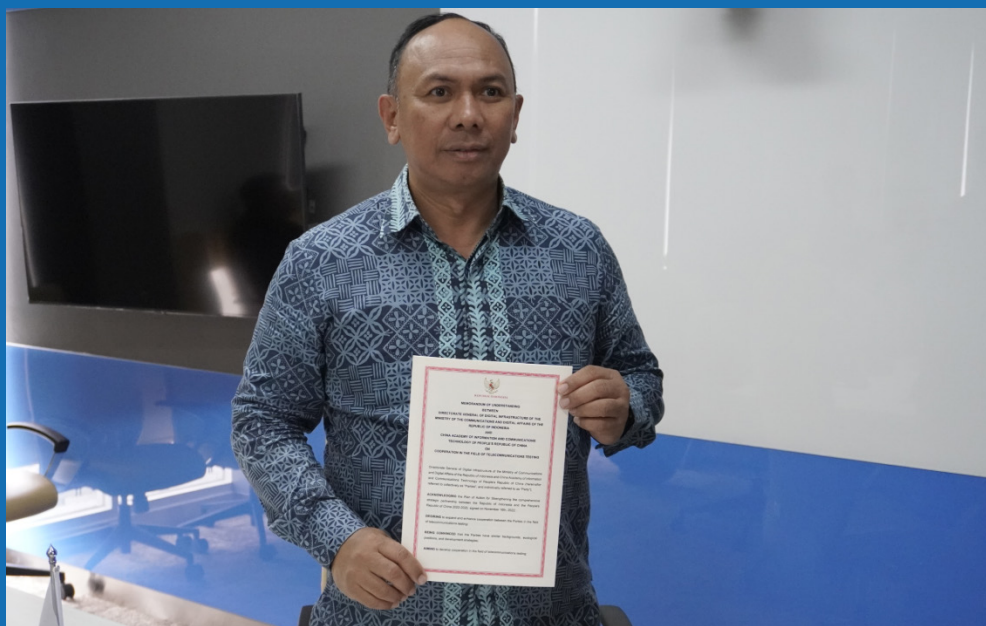
Adapun nilai **Kolaboratif** diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara berbagai unit kerja serta kerja sama dengan mitra terkait. Proses pengadaan hingga pemanfaatan sistem melibatkan koordinasi lintas fungsi, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan keahliannya. Kolaborasi ini tidak hanya memperlancar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan *SAR Test System* dalam mendukung tugas-tugas operasional. Hubungan yang harmonis dengan mitra eksternal turut memperkuat jaringan kerja dalam upaya peningkatan keselamatan dan penanggulangan kondisi darurat.



Penandatanganan MOU dengan Lab Luar Negeri CCTL

Perjanjian MoU ini menjadi dasar kerja sama antara Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tiongkok dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui kerja sama ini, kedua pihak membuka ruang untuk saling bertukar pengetahuan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mendorong kolaborasi riset, serta mengembangkan kegiatan yang mendukung pengujian, kalibrasi, dan pemanfaatan teknologi telekomunikasi secara lebih efektif. Kesepahaman ini juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. IDTH sebagai Lab Pengujian Telekomunikasi milik Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, ditunjuk sebagai lab pelaksana untuk kegiatan yang beririsan dengan tugas dan fungsi IDTH.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam mendukung pengembangan ekosistem pengujian perangkat telekomunikasi, meningkatkan kompetensi dan pertukaran keahlian, serta mendorong lahirnya inovasi dan standar kerja yang lebih baik. Selain itu, MoU ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program bersama, peningkatan kualitas layanan pengujian, dan penguatan kerja sama internasional yang memberi manfaat nyata bagi pengembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.



Penandatanganan PKS dengan SNSU

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Badan Standardisasi Nasional dalam pengelolaan sumber daya laboratorium kalibrasi lingkup waktu, frekuensi, dan kelistrikan. Melalui kerja sama ini, para pihak berupaya membangun koordinasi yang lebih terpadu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laboratorium dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang saling mendukung dalam penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya laboratorium kalibrasi, khususnya pada lingkup waktu, frekuensi, dan kelistrikan. Selain itu, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan, memperkuat ketertelusuran pengukuran, serta mendukung pemenuhan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 agar kedua pihak dapat menghasilkan layanan yang lebih andal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ekosistem standardisasi dan pengujian di Indonesia.





EMC Excellence, yang Dihadiri oleh Menteri Kemkomdigi

Kegiatan EMC Excellence Forum 2025 diselenggarakan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas teknologi perangkat digital dan kebutuhan akan standar pengujian yang semakin ketat, khususnya dalam aspek *Electromagnetic Compatibility* (EMC). Perkembangan teknologi seperti 5G dan perangkat digital modern mendorong pentingnya pengujian yang mampu menjamin keamanan, keandalan, serta tidak terjadinya gangguan antarperangkat. Selain itu, forum ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Indonesia dalam memperkuat kedaulatan digital melalui peningkatan kapasitas pengujian dalam negeri, dengan dukungan fasilitas seperti *Indonesia Digital Test House* (IDTH) yang diproyeksikan sebagai pusat pengujian regional.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan lembaga terkait dalam mengembangkan standar dan praktik pengujian EMC yang sesuai dengan perkembangan global. Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas pengujian perangkat, mendorong inovasi kebijakan, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat pengujian perangkat digital di tingkat regional dan internasional. Kegiatan ini juga mendukung terciptanya ekosistem pengujian yang mampu menjamin keandalan perangkat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri terhadap teknologi yang digunakan.







Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

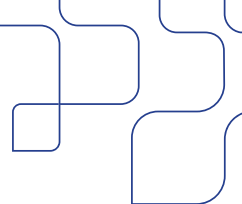


Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan Penghargaan Pelayanan Publik kepada satuan kerja pusat dan daerah yang dinilai menunjukkan kinerja unggul berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi unit kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.



Melalui pemberian penghargaan tersebut, Kemkomdigi mendorong seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI), sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, turut memperoleh Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2025. BP2KOMDIGI dinilai telah memenuhi kriteria penilaian kinerja pelayanan publik dengan predikat **“Pelayanan Prima”** dan kategori **“A”**, yang mencerminkan kualitas layanan yang unggul, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Pemeliharaan Akreditasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) terus meningkatkan kualitas layanan laboratoriumnya melalui pemeliharaan akreditasi dan peningkatan kemampuan melalui penambahan ruang lingkup untuk Laboratorium Pengujian (LP-112-IDN), Laboratorium Kalibrasi (LK-137-IDN), dan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP-029-IDN). Selain itu, selaras dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diperoleh BP2KOMDIGI sejak tahun 2020, BP2KOMDIGI telah tersertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ABMS-071).

Ruang lingkup terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dimiliki BP2KOMDIGI mencakup 39 ruang lingkup pengujian, 18 ruang lingkup kalibrasi, dan 4 ruang lingkup PUP. Asesmen/surveilans akreditasi telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, sementara penerbitan lampiran sertifikat akreditasi masih diproses hingga awal tahun 2026.

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital yang semakin pesat, BP2KOMDIGI terus melakukan penyesuaian dan perluasan ruang lingkup akreditasi laboratoriumnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan pengujian dan kalibrasi tetap relevan, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan industri serta pemangku kepentingan. Pada tahun 2025, BP2KOMDIGI melakukan beberapa penambahan dan penyesuaian ruang lingkup, baik pada laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, maupun penyelenggara uji profisiensi (PUP). Jumlah ruang lingkup laboratorium pengujian tetap dipertahankan sebanyak 39, ruang lingkup kalibrasi mengalami peningkatan dari 18 menjadi 26, dan ruang lingkup PUP juga bertambah dari 4 menjadi 5.

Surveilans ke-1 ISO 37001 telah dilaksanakan pada tanggal 1–2 Oktober 2025 sebagai bagian dari proses pemeliharaan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan sistem tetap berjalan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan standar. Hasil surveilans menunjukkan bahwa implementasi pengendalian anti penyuapan di BP2KOMDIGI telah dilaksanakan secara memadai, termasuk dalam aspek kebijakan, prosedur, serta kesadaran personel. Pelaksanaan surveilans ini sekaligus menjadi bentuk evaluasi berkala untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan efektivitas sistem yang telah diterapkan tetap terjaga.

Penyelenggaraan Uji Profisiensi Ruang Lingkup *Subscriber Station* Berbasis Standar Teknologi *Global System for Mobile Communications (GSM)*

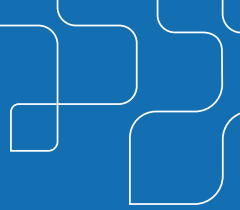
Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi laboratorium pengujian serta menjaga konsistensi mutu hasil pengujian, BP2KOMDIGI secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan uji profisiensi. BP2KOMDIGI telah memperoleh akreditasi sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17043:2023 dengan nomor akreditasi PUP-029-IDN. Perolehan akreditasi menunjukkan bahwa BP2KOMDIGI memiliki kapabilitas teknis, sistem manajemen mutu, serta independensi yang memadai dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program uji profisiensi.

Ruang lingkup uji profisiensi yang telah diselenggarakan adalah *Subscriber Station* berbasis standar teknologi *Global System for Mobile Communications (GSM)*. Pemilihan ruang lingkup ini didasarkan pada kebutuhan industri dan kondisi pemanfaatan teknologi telekomunikasi yang masih relevan hingga saat ini. Meskipun teknologi telekomunikasi telah berkembang hingga generasi kelima (5G), teknologi GSM (2G) tetap digunakan secara luas.

Objek uji profisiensi yang digunakan adalah perangkat *Global Positioning System (GPS) tracker*. Perangkat ini dipilih karena penggunaannya yang sangat luas di masyarakat, khususnya dalam sektor logistik, transportasi, dan penyewaan kendaraan. *GPS tracker* berfungsi untuk memantau dan melacak posisi kendaraan secara *real-time* atau periodik.

Parameter yang diujikan meliputi *output power* dan *frequency error*. Kedua parameter tersebut merupakan parameter utama yang menentukan kinerja perangkat dalam memancarkan sinyal serta kesesuaian frekuensi operasional terhadap standar yang ditetapkan. Pengendalian terhadap parameter ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat tidak menimbulkan interferensi yang dapat mengganggu kinerja jaringan telekomunikasi maupun perangkat lain di sekitarnya.

Kegiatan uji profisiensi ini diikuti oleh 7 laboratorium dalam negeri dengan total 17 peserta. Partisipasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan laboratorium terhadap penyelenggaraan uji profisiensi sebagai sarana evaluasi kinerja. Melalui kegiatan ini, peserta yang berpartisipasi dapat membandingkan hasil pengujian yang diperoleh dengan nilai acuan maupun hasil laboratorium lain, sehingga dapat diidentifikasi tingkat akurasi, presisi, serta konsistensi metode pengujian yang digunakan.



Tujuan penyelenggaraan uji profisiensi ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu sebagai sarana evaluasi kinerja laboratorium secara objektif dan terukur, sebagai mekanisme pemantauan kinerja laboratorium secara berkelanjutan, serta sebagai alat evaluasi internal bagi masing-masing laboratorium untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Selain itu, kegiatan ini juga memberikan manfaat dalam menilai unjuk kerja metode pengujian yang digunakan, termasuk dalam mengidentifikasi potensi deviasi dan ketidaksesuaian.

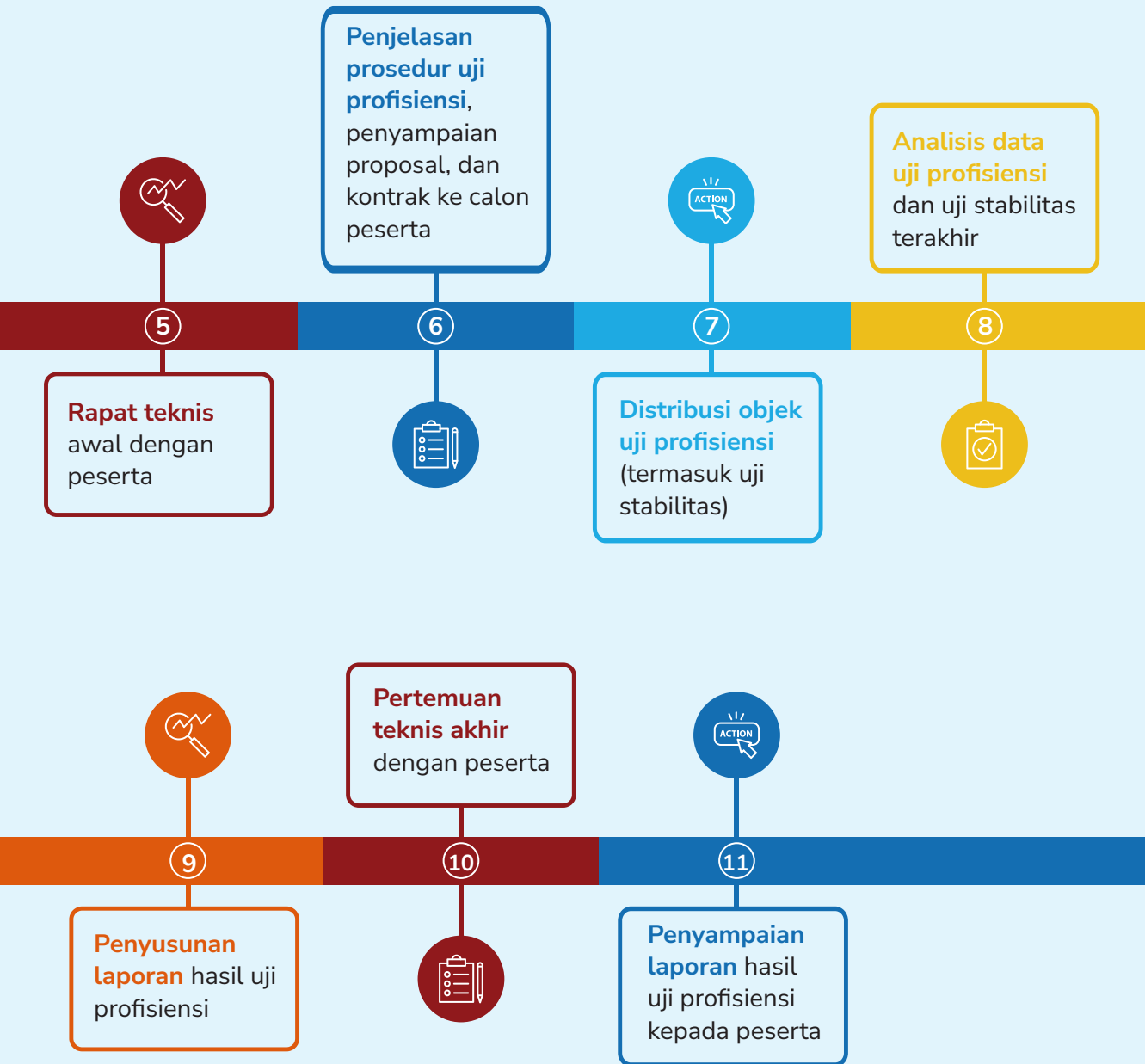
BP2KOMDIGI menyelenggarakan uji profisiensi sesuai dengan standar ISO/IEC 17043:2023, yang mencakup perencanaan program, pengendalian mutu, distribusi objek uji, hingga pelaporan hasil. Sementara itu, analisis statistik terhadap data hasil uji dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 13528:2022, sehingga pendekatan evaluasi yang digunakan memenuhi kaidah statistik yang diakui secara internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi.

Untuk menjaga integritas hasil uji profisiensi, dilakukan uji stabilitas terhadap objek uji pada tiga tahapan utama, yaitu pada awal, pertengahan, dan akhir periode distribusi. Uji stabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa karakteristik teknis objek uji tidak mengalami perubahan signifikan selama proses distribusi dan pengujian oleh peserta. Dengan demikian, perbedaan hasil yang diperoleh antar laboratorium dapat dipastikan berasal dari kinerja laboratorium, bukan dari variasi objek uji.



Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:





Pelaksanaan Uji Banding Ruang Lingkup Pengujian dan Kalibrasi

Dalam rangka penjaminan mutu hasil pengujian, laboratorium harus melakukan pemantauan keabsahan hasil pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.7 tentang Pemastian Keabsahan Hasil melalui partisipasi dalam uji profisiensi dan partisipasi dalam perbandingan antar laboratorium selain uji profisiensi. Pemastian keabsahan hasil selain uji profisiensi bisa dilakukan dengan uji banding antar laboratorium atau uji banding personel.

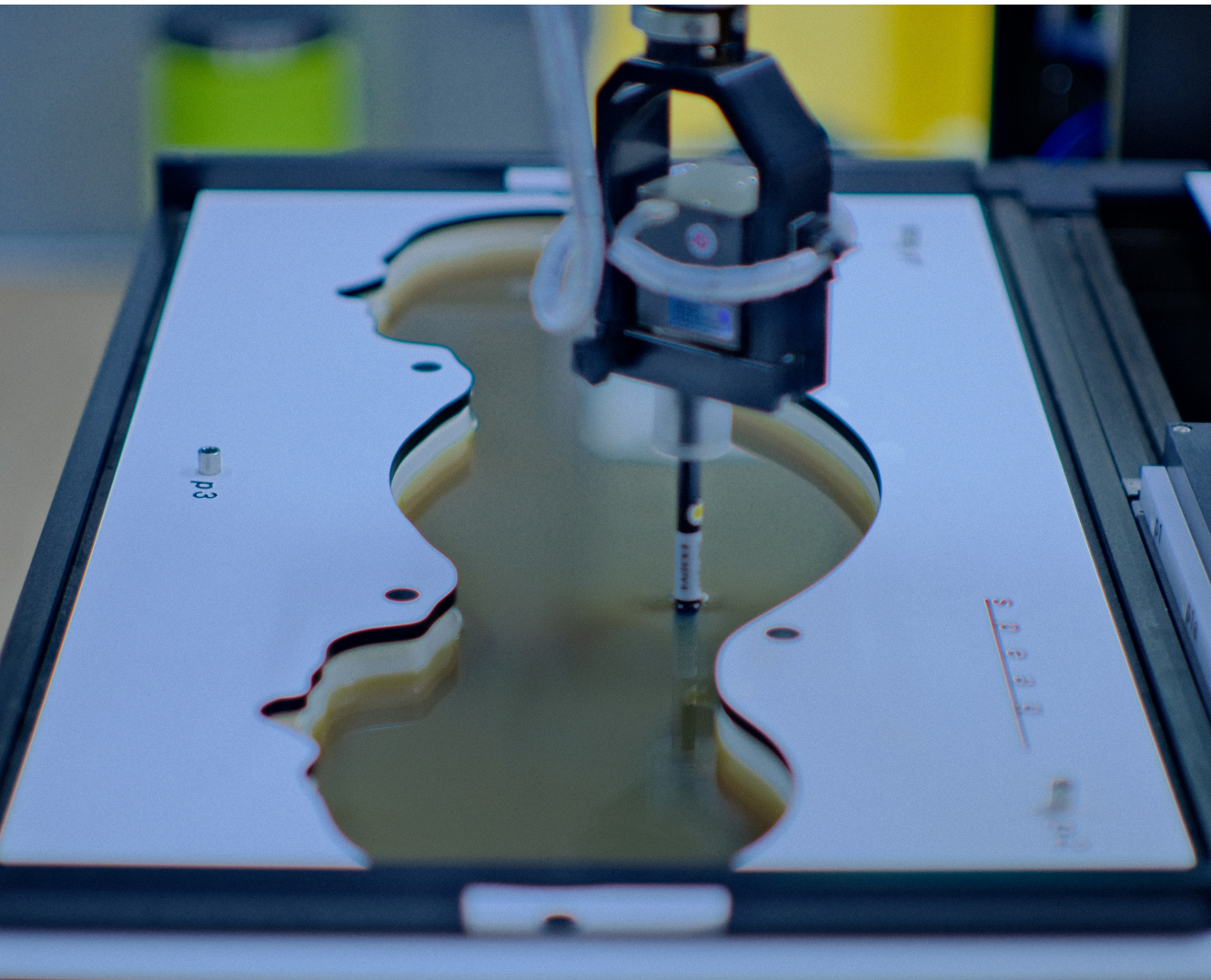
Pelaksanaan uji banding ruang lingkup pengujian dan kalibrasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu laboratorium. Kegiatan ini tidak hanya memastikan bahwa hasil pengujian memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme *benchmarking* untuk meningkatkan kompetensi teknis laboratorium, mengidentifikasi potensi deviasi, serta memperkuat keandalan data pengujian yang dihasilkan oleh laboratorium.

Pelaksanaan uji banding mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu melakukan koordinasi bersama laboratorium rekan terkait mekanisme pelaksanaan, perencanaan jadwal, penentuan parameter yang akan diuji bandingkan, penyediaan objek uji profisiensi, penyediaan metode pengujian sesuai ruang lingkup, verifikasi dan analisis data hasil uji banding, serta penyusunan laporan hasil uji banding. Adapun beberapa kegiatan uji banding yang telah dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uji Banding Luar Negeri (Pengujian)	● EMF (dengan SIRIM Malaysia)
Uji Banding Dalam Negeri (Pengujian)	● Perangkat Telekomunikasi Jaringan Ethernet ● Perangkat NB IoT (LPWA Seluler) ● Perangkat VSAT ● Antenna ● Perangkat IoT (LPWA Non Seluler) ● Telepon Satelit ● Radio Microwave

Uji Banding Dalam Negeri (Kalibrasi)

- Kalibrasi OSA
- Kalibrasi OVA
- Kalibrasi *Optical Power Meter*
- Kalibrasi *Optical Laser Source*
- Kalibrasi *Clamp Meter*
- Kalibrasi *Network Analyzer*
- Kalibrasi *Signal Generator*
- Kalibrasi *Spectrum Analyzer*



Tarif Volatil, Draf Kajian Usulan Tarif PNBP Pengujian Ke Kementerian Keuangan

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Pengujian merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta menjaga relevansi tarif dengan kondisi aktual biaya operasional dan perkembangan teknologi, diperlukan analisis dan evaluasi berkala terhadap struktur tarif yang berlaku.

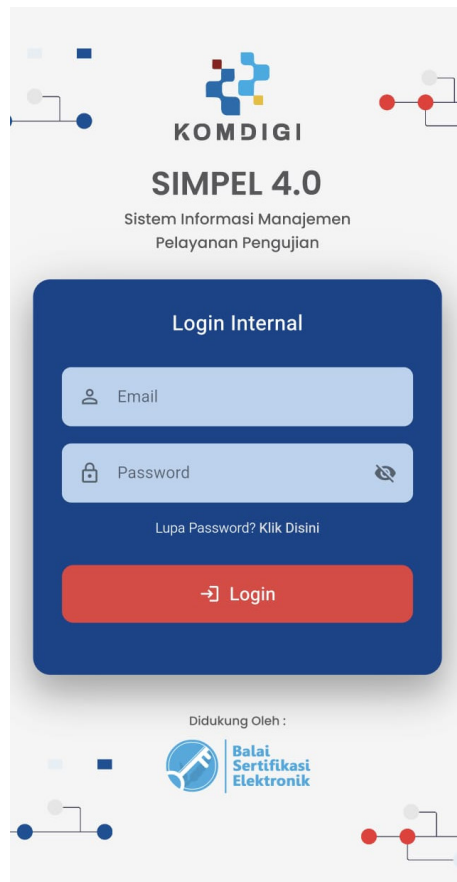
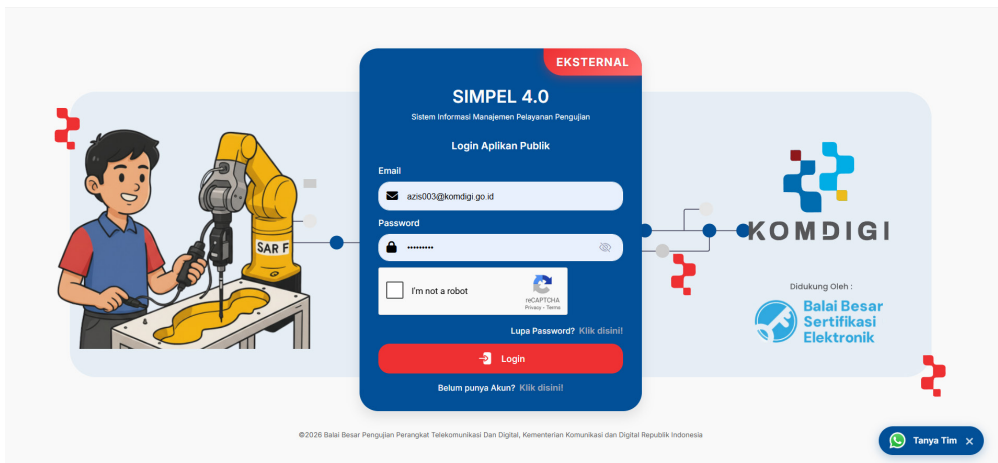
Seiring dengan dinamika kebutuhan layanan pengujian dan kalibrasi serta adanya perkembangan teknologi, biaya layanan Balai Besar Pengujian turut mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap tarif layanan yang berlaku agar tetap relevan, baik bagi Balai Besar Pengujian sebagai penyelenggara layanan maupun bagi pengguna layanan.

Program kerja Analisa dan Evaluasi Justifikasi Penyesuaian Tarif Pengujian dan Kalibrasi ini disusun sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa struktur tarif yang diusulkan mencerminkan kondisi kebutuhan pengembangan layanan. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi tarif yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tentunya, penyesuaian tarif pengujian dan kalibrasi harus didasarkan pada justifikasi yang kuat.

Menurut PP Nomor 44 Tahun 2025, pada Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa tarif di bidang pengujian laboratorium termasuk dalam tarif volatil. Di mana tarif volatil ini adalah tarif yang dapat berubah, naik atau turun, setidaknya satu kali dalam satu tahun, dan perubahannya tergantung pada perubahan komponen yang membentuknya. Penetapan tarif volatil ini nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setelah penetapan PMK, akan dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait perubahan apa saja yang terdapat pada PMK tersebut. Diharapkan dengan adanya PMK ini, tarif Balai Besar Pengujian lebih fleksibel terhadap dinamika pasar.

Usulan perubahan tarif volatil Balai Besar Pengujian telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada Juni 2025. Kemudian pembahasan lebih lanjut dan komprehensif sejak bulan Agustus–Desember 2025. Saat ini sedang dilakukan rencana pembahasan usulan oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) yang dikoordinasikan melalui Kementerian Keuangan. Diharapkan PMK akan rilis pada tahun berjalan 2026.

GO Live Simpel Next Generation

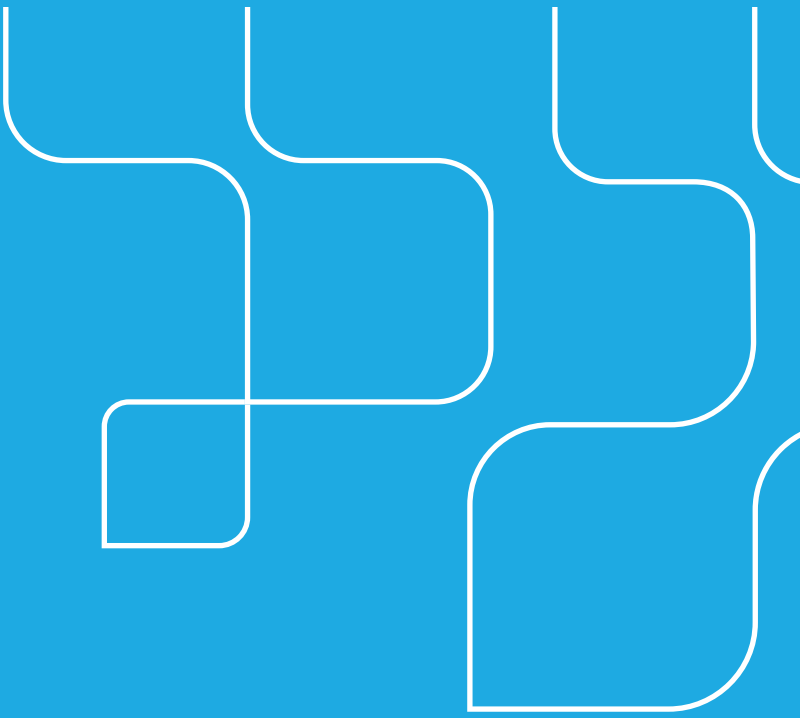


Dalam rangka mendukung transformasi digital layanan pengujian perangkat telekomunikasi, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) telah menuntaskan pengembangan dan implementasi *SIMPEL Next Generation* sebagai penyempurnaan dari aplikasi SIMPEL sebelumnya. Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya BP2KOMDIGI untuk memperkuat tata kelola layanan pengujian agar lebih modern, terintegrasi, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan layanan yang terus berkembang.

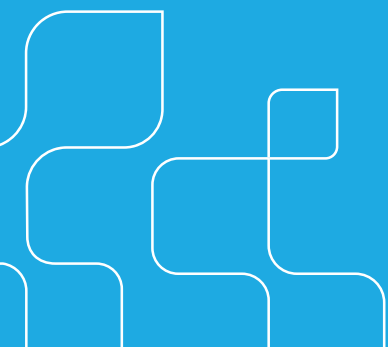
Melalui *SIMPEL Next Generation*, BP2KOMDIGI menghadirkan pembaruan sistem yang tidak hanya melanjutkan fungsi layanan sebelumnya, tetapi juga menyempurnakan proses bisnis pengujian secara menyeluruh. Penyempurnaan tersebut tercermin dalam beberapa perubahan utama, yaitu penerapan LHU per *cluster*, multiuser per aplikasi, sistem deposit dan pengalihan biaya, diskon otomatis bagi perangkat dengan TKDN minimal 50% serta dukungan riset hingga 0 rupiah, keberlanjutan proses surat kebutuhan sampel uji ke tahap pengujian tanpa membuat permohonan baru, transformasi deklarasi teknis berbasis *webform* yang pengisiannya telah diklasifikasikan sesuai fitur, fitur *clone* permohonan, serta fitur amendemen LHU yang memungkinkan aplikasi mengajukan perubahan atas LHU yang telah terbit.

Penerapan berbagai pembaruan tersebut mendorong proses layanan pengujian menjadi lebih efisien, fleksibel, dan terstandar. Seluruh tahapan layanan dapat dilakukan secara digital mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pemantauan status layanan, pembayaran, pelaksanaan pengujian, hingga penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU), sehingga interaksi antara aplikasi dan petugas BP2KOMDIGI dapat berlangsung secara lebih efektif.

Selain tersedia dalam versi *website*, *SIMPEL Next Generation* juga didukung oleh versi *mobile* yang memperkuat pelaksanaan proses operasional layanan pengujian. Kehadiran layanan *mobile* ini mendukung mobilitas penguji dalam melakukan pemindaian *QR Code Device Under Test (DUT)* untuk mengakses detail perangkat, mencatat penerimaan DUT, menelusuri riwayat DUT, serta menjalankan dan memantau sesi pengujian langsung melalui perangkat bergerak. Dengan implementasi tersebut, *SIMPEL Next Generation* menjadi bagian penting dari upaya BP2KOMDIGI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat profesionalisme tata kelola layanan, dan meminimalkan potensi kesalahan administratif melalui sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.



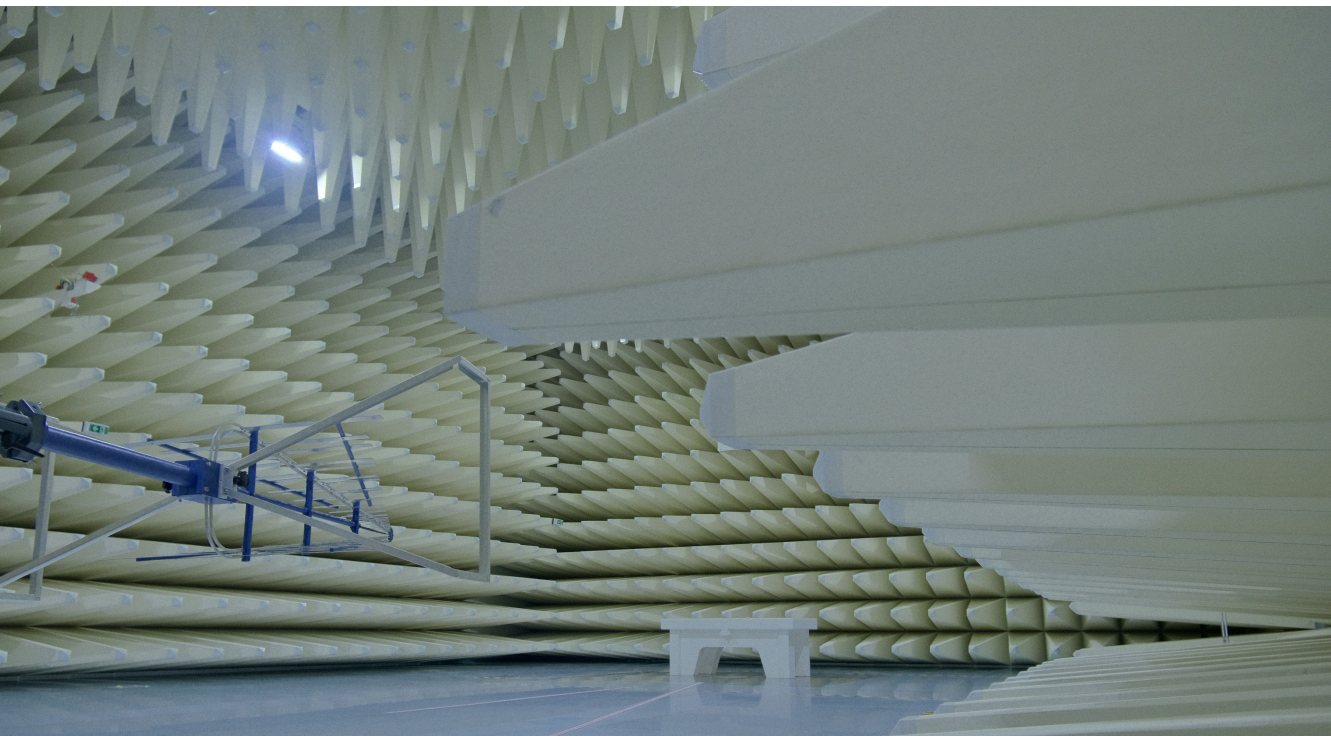
Realisasi **Anggaran**



Realisasi anggaran Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD sebesar Rp306,7 triliun. Kebijakan tersebut menekankan optimalisasi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja operasional, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta kegiatan lainnya.

Dalam implementasinya, BP2KOMDIGI secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan pola belanja agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada *output* kinerja. Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi dan digital, serta tetap mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran terhadap pagu awal termasuk blokir tercatat sebesar 71,30%, yang mencerminkan adanya penyesuaian terhadap alokasi anggaran yang dibatasi atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal selama tahun berjalan. Sementara itu, jika dilihat dari pagu tanpa blokir, realisasi anggaran mencapai 98,21%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal terhadap dana yang secara efektif dapat digunakan.



Berikut merupakan rincian realisasi anggaran BP2KOMDIGI tahun 2025

1. Pagu Termasuk Blokir

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	78.301.620,00	76.330.199,33	97,48
Belanja Barang	59.062.485.000,00	32.531.289.379,00	55,08
Belanja Modal	28.959.368.000,00	28.176.864.261,00	97,30
Grand Total	95.852.015.000,00	68.341.173.573,00	71,30

2. Pagu Tanpa blokir

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	78.301.620,00	76.330.199,33	97,48
Belanja Barang	32.798.461.000,00	32.531.289.379,00	99,19
Belanja Modal	28.959.368.000,00	28.176.864.261,00	97,30
Grand Total	69.587.991.000,00	68.341.173.573,00	98,21

Capaian ini menggambarkan bahwa BP2KOMDIGI mampu mengelola anggaran secara adaptif di tengah kebijakan efisiensi nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan belanja dan pencapaian kinerja organisasi. Optimalisasi penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap transformasi digital nasional.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran BP2KOMDIGI tahun 2025 mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi fiskal, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi dan masyarakat.



Bab

4

PENUTUP



Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital (BP2KOMDIGI) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan berbagai program strategis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pengujian perangkat telekomunikasi. Upaya pemenuhan kapasitas pengujian perangkat TIK melalui pengadaan perangkat *Specific Absorption Rate* (SAR) menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur pengujian yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengujian dan pengembangan perangkat digital dalam negeri turut memperkuat peran kelembagaan BP2KOMDIGI dalam mendukung ekosistem industri nasional.

Selama periode pelaporan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik berupa peningkatan permintaan layanan pengujian maupun kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat, BP2KOMDIGI tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari keberhasilan dalam menjaga kualitas layanan serta ketepatan waktu penyelesaian pengujian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik turut menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tersebut. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan teknologi, telah memungkinkan BP2KOMDIGI untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengujian.

Ke depan, BP2KOMDIGI akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan. BP2KOMDIGI juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat demi menjaga standar dan kualitas perangkat telekomunikasi yang beredar di pasar.

Akhir kata, laporan kinerja ini menjadi cermin dari komitmen BP2KOMDIGI untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan industri telekomunikasi di Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh pihak terkait, diharapkan BP2KOMDIGI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang semakin maju dan berkualitas.

LAPORAN KINERJA 2 0 2 5

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Tapos No.46, Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16464